# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

TAHUN

**2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR**

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang:

a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota denpasar Tahun 2021 Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
3. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
4. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
9. PERUBAHAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. PERUBAHAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
16. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

17. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
19. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
20. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1628 / HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, perlu disusun Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Nomor Nomor 24 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
b. melakukan reviu terhadap cascading Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Dipindai dengan CamScanner

c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

e. mengkoordinasikan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Juni 2022

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

Dra. I Gusti Ayung Sri Wetrawati, M.Si
NIP. 196603111195032001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth: 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL :
NOMOR : 188.45 /1628 / HK/ 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kelompok Kerja :
- Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data Dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahtraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dipindai dengan CamScanner

- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Perencana Ahli Muda

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar

Dra. Gusti Ayung Sri Wetrawati,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNyalah telah berhasil disusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Denpasar Tahun 2021-2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan san sasaran) serta Rencana Kinerja Tahunan.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah dan Diktum Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar atau disebut juga Renstra Kota Denpasar tahun 2021-2026 dalam urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, Acuan atau rujukan yang wajib dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan pegawai/non struktural/fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas peran aktif seluruh karyawan dan karyawati. Khususnya Tim Penyusun serta pihak-pihak terkait "Stakeholders" yang telah memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas tersusunnya Renstra Ini.

Selanjutnya sangat disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat Fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud. Oleh kerena itu kami mengharapkan saran-saran yang dapat kami pergunakan untuk melakukan review bila diperlukan di masa yang akan datang.

Denpasar, 9 September 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

# DAFTAR ISI


| | Hal |
|---|---|
| **KATA PENGANTAR** ..... | i |
| **DAFTAR ISI** ..... | iii |
| **BAB I PENDAHULUAN** ..... | **1** |
| 1.1 Latar Belakang ..... | 1 |
| 1.2 Landasan hukum ..... | 12 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan ..... | 15 |
| 1.4 Sistematika Penulisan ..... | 16 |
| **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR** ..... | **20** |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD ..... | 20 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... | 52 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar ..... | 56 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD ..... | 74 |
| **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** | **78** |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD ..... | 78 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 82 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali ..... | 86 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... | 92 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... | 94 |
| **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** ..... | **95** |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ..... | 95 |
| **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... | **99** |
| 5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar ..... | 99 |
| 5.2 Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar ..... | 101 |

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 110**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan ..... 110

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... **163**

**BAB VIII PENUTUP** ..... **173**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender ( IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesebjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan atau kesenjangan gender.

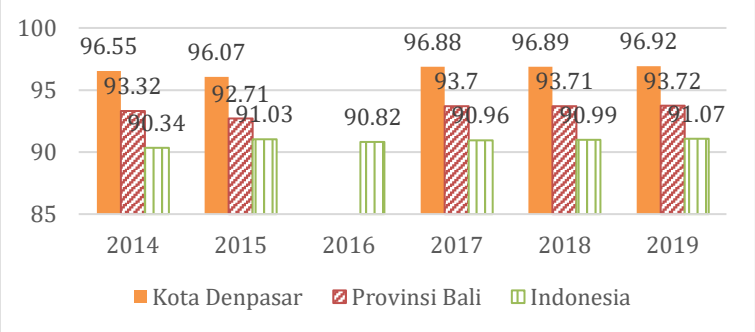


**Gambar 1.1**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2014–2019**
*Sumber: BPS, 2020*

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum dapat mencapai angka yang memperlihatkan kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki (belum mencapai angka mutlak 100). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan target Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2014–2019. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar cukup baik.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah. Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan Kota Denpasar di bidang sosial, politik, dan ekonomi masih belum optimal jika dibandingkan perempuan Provinsi Bali dan Indonesia secara umum. Adanya pandemi *covid-19* berpotensi semakin memperburuk kondisi pemberdayaan perempuan karena ekonomi nasional terkena dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menstimulasi perempuan untuk dapat berperan lebih aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk mensiasati bagaimana mendorong peran aktif perempuan dimasa pandemi.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2014

– 2019. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar cukup baik.

**Tabel 1.1**
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019**

| No | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDG Indonesia | | 70,7 | 70,8 | 71,4 | 71,7 | 72,1 | 70,7 | 70,7 |
| 2. | IDG Provinsi Bali | | 62,25 | 62,99 | | 63,76 | 64,18 | 62,25 | 62,25 |
| 3. | IDG Kota Denpasar | | 58,25 | 58,50 | | 58,80 | 59,09 | 58,25 | 62,16 |
| 4. | Target IDG Kota Denpasar* | | | | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | | | | 98,00 | 98,48 | 97 | 104 |

*Sumber: BPS dan *Renstra DP3A2KB Kota Denpasar 2016 – 2021*

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, utamanya kasus kekerasan seksual anak. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan, karena adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah domestik dalam keluarga. Selain itu faktor ketidaktahuan dan sulitnya akses menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga Negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah.

Data kasus KDRT yang melapor di UPTD PPA Kota Denpasar meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2019 kasus KDRT tercatat 61 kasus dan meningkat di Tahun 2020 menjadi 86 kasus. Tidak hanya kasus KDRT, kasus kekerasan seksual anak dari 16 kasus di Tahun 2019 juga meningkat menjadi 36 kasus di Tahun 2020. Data Kasus Terpilah sesuai jenis kelamin dari Tahun 2012 sampai dengan 2020 DP3AP2KB Kota Denpasar disajikan pada Data Tabel 1.2 dan Data Kasus terpilah pada UPPA Polresta Denpasar disajikan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.2**

Kasus Data Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

| Unit Pelayanan Terpadu | Tahun | KDRT | | Seksual | | ABH | | Penelantaran | | Lainnya | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| | 2012 | 0 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| P2TP2A | 2013 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 |
| | 2014 | 3 | 6 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 |
| | 2015 | 0 | 40 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 107 |
| | 2016 | 4 | 24 | 1 | 19 | 27 | 0 | 1 | 14 | 16 | 17 | 123 |
| | 2017 | 0 | 24 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 97 |
| | 2018 | 6 | 41 | 2 | 17 | 30 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 138 |
| | 2019 | 0 | 61 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 | 123 |
| | 2020 | 6 | 55 | 3 | 35 | 12 | 0 | 6 | 27 | 33 | 62 | 239 |
| Jumlah | | 21 | 275 | 7 | 149 | 148 | 1 | 7 | 105 | 63 | 163 | 939 |

**Tabel 1.3**

Kasus Data Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin pada UPPA Polresta Denpasar Tahun 2012 – 2020

| Unit Pelayanan Terpadu | Tahun | JENIS KASUS | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KDRT | SEKSUAL | ABH (Pelaku Anak) | PENELANTARAN | MRTP | KTA | |
| UPPA POLRESTA DENPASAR | 2011 | 110 | 13 | 18 | 0 | 49 | 15 | 205 |
| | 2012 | 94 | 15 | 4 | 0 | 28 | 10 | 151 |
| | 2013 | 60 | 13 | 13 | 12 | 5 | 22 | 125 |
| | 2014 | 43 | 25 | 8 | 4 | 18 | 17 | 115 |
| | 2015 | 83 | 29 | 20 | 5 | 22 | 8 | 167 |
| | 2016 | 42 | 26 | 18 | 4 | 8 | 4 | 102 |
| | 2017 | 35 | 15 | 22 | 3 | 3 | 13 | 91 |
| | 2018 | 24 | 18 | 15 | 3 | 7 | 10 | 77 |
| | 2019 | 27 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 49 |
| | 2020 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| Jumlah | | 531 | 179 | 130 | 33 | 142 | 105 | **1120** |

Sumber data Polresta Denpasar

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkotika, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya wajib dilindungi oleh negara.

Pemenuhan Hak Anak merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Dalam Bidang Pemenuhan Hak Anak mencangkup tiga bidang yang menjadi wewenang antara lain hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. Upaya pemenuhan hak anak ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing” dan mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas dan terkendalinya mobilitas penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Srategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan perencanaan pembangunan pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses keterkaitan visi dan misi Kota Denpasar. Keterkaitan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen bidang tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan **visi** Kota Denpasar "KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU", maka diperlukan **misi.** Keterkaitan misi Kota Denpasar yaitu misi 5 "Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali" didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, dan terkait dengan RPJMD Kota Denpasar ; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Guna mendukung hal tersebut maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah , sebagai konsekuensi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), dimana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana Kota Denpasar merupakan dua urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dua urusan wajib non pelayanan dasar tadi dilaksanakan oleh satu badan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Sejak 19 Desember 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dan dijabarkan pada Uraian Tugas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program , kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

**Gambar 1.1**
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

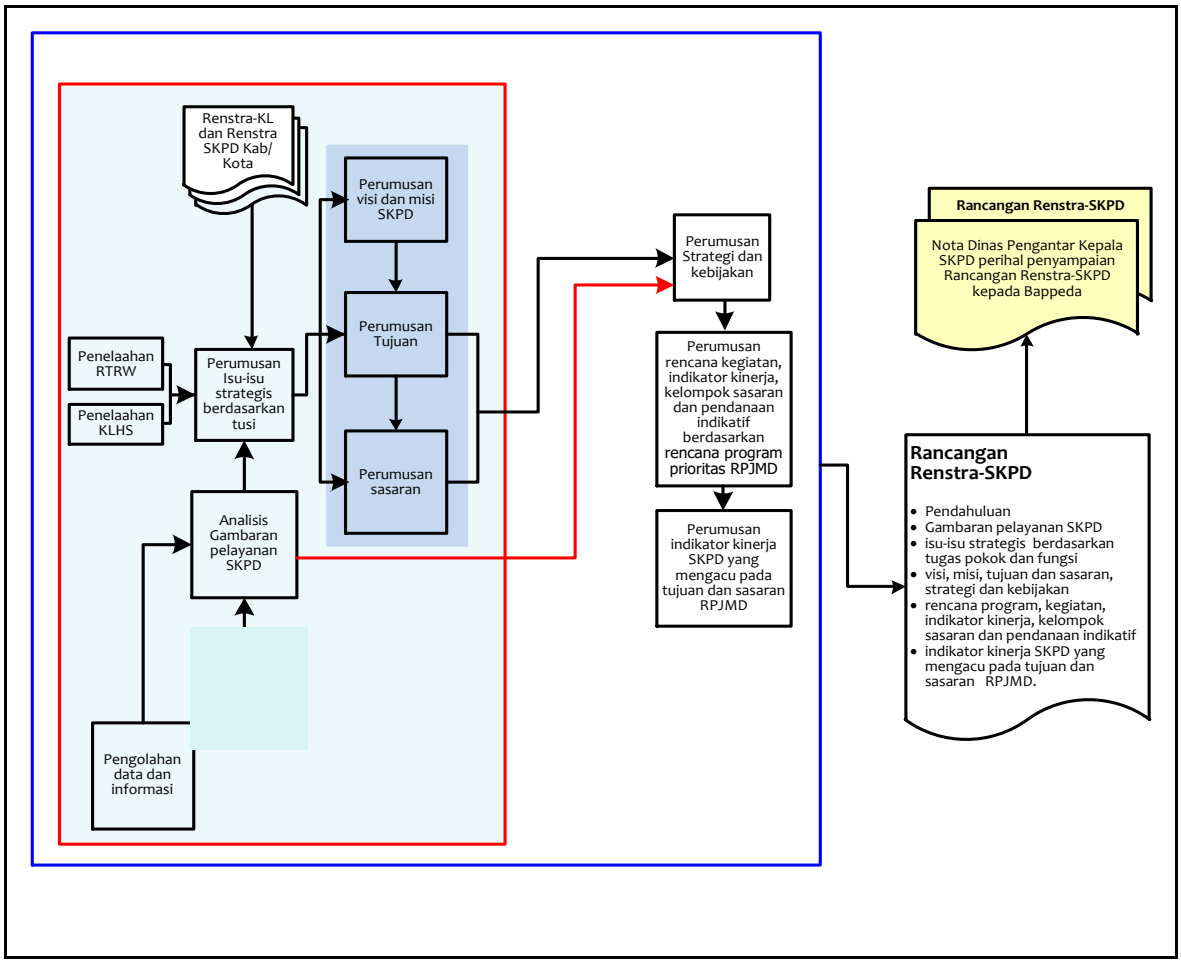


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.2**
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

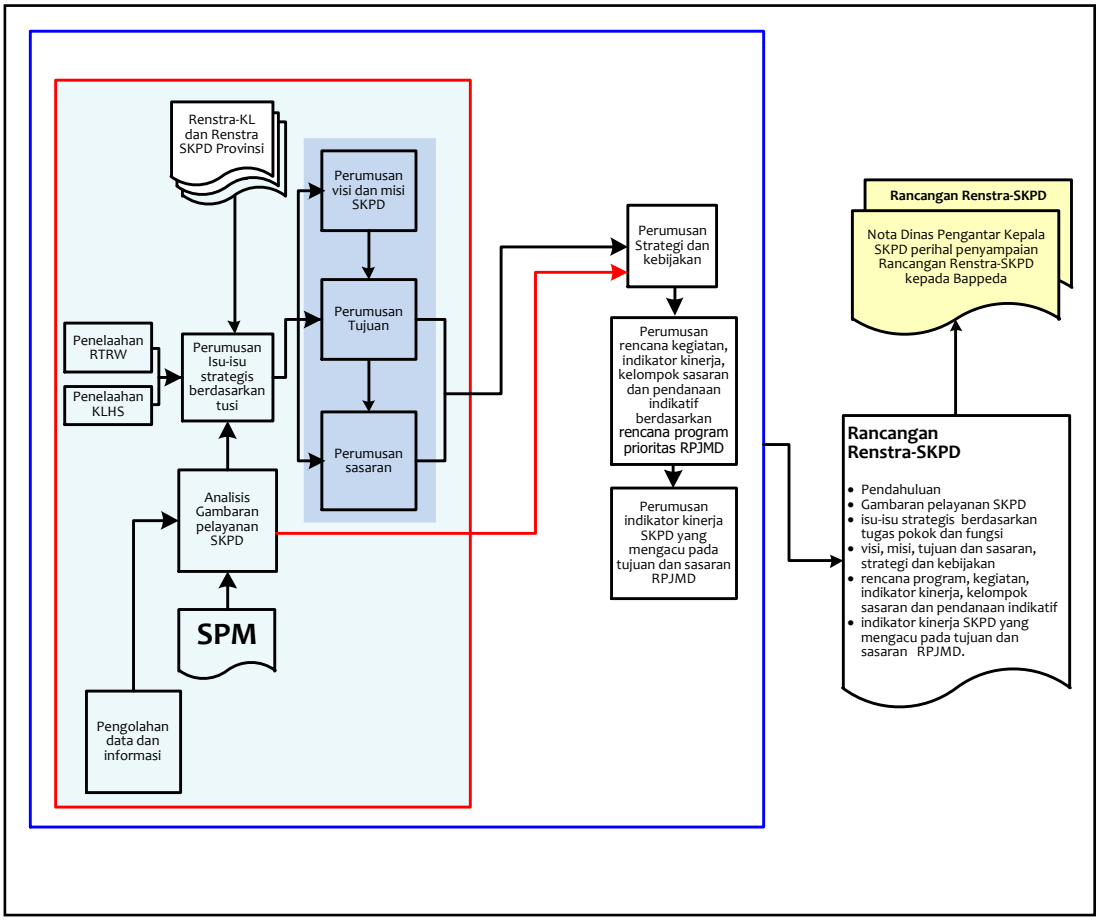


Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

**Gambar 1.3**

Keterkaiatan Tahapan penyusunanan RPJMD Kota Denpasar dengan Penyusnan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar

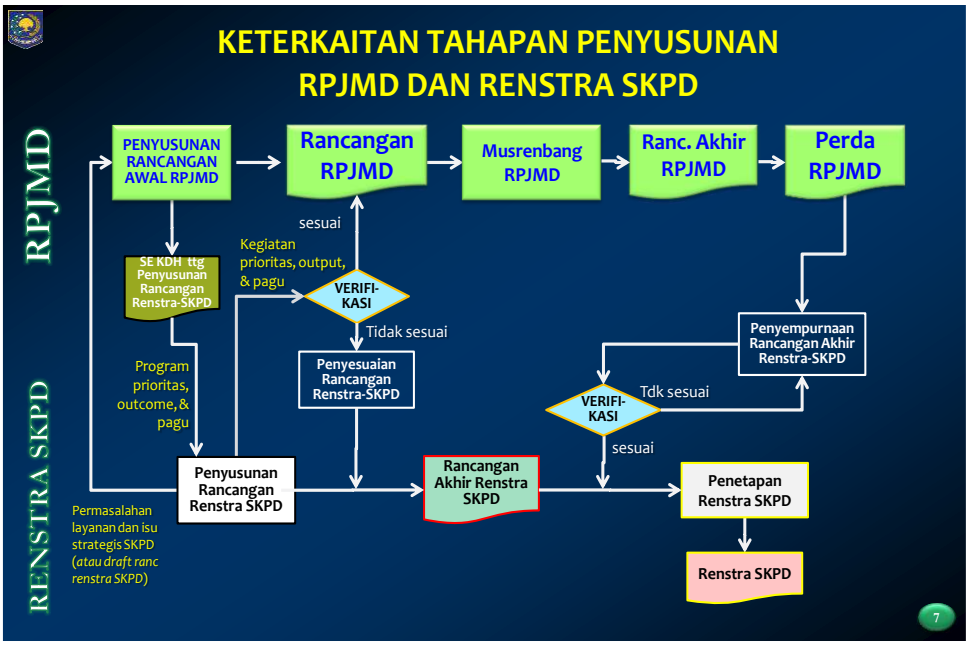


## 1.2 Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Renja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah ;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3).
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Denpasar sebagaimana Visi dan Misi Walikota yang di gambarkan dalam bentuk program, kegiatan , sub kegiatan sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kata Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan

RPJMD Kota Denpasar dan sekaligus sebagai pedoman dan acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan karyawan/karyawati di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

## 1.4. Sistematika

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah; Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas PPPAPPKB, Fungsi Renstra Dinas PPPAPPKB dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas PPPAPPKB, Keterkaitan Renstra Dinas PPPAPPKB dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas PPPAPPKB ,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PPPAPPKB.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PPPAPPKB.

Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas PPPAPPKB, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

2.1 Tugas Fungsi , dan Struktur Organisasi Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

2.2 Sumber Daya Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPAPPKB Kota Denpasar

3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN,SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPPAPPKB

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program , kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas PPPAPPKB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas PPPAPPKB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana. Indikator kinerja Dinas PPPAPPKB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan-pelaksanaan dan penutup.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada struktur orgaisasi daerah, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Pemerintah daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pengelolaan Perencanaan Umum Pemerintah, Pengendalian Hasil Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudan Good Governance.

2. 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun Susunan Organisasi dan uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
   a. Menetapkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana ;
   c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
   d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalah, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas ;

e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan yang ada sesuai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. Menyelenggaraan pelayanan umum, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ,Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelayanan masyarakat ;
g. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian kuaitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ;
h. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
i. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh data yang akurat ;
j. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga

berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ;

k. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB sesuai prosedur yang berlaku sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal ;

l. Melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pengendalian penduduk;

m. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk peningkatan pelayanan;

n. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

o. Menyelenggarakan pembinaan urusan kesetretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlak untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

p. Membina kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang ;

r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana opearsional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;

e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapakan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencana Dinas;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Menyusun rencana program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hokum, dan organisasi serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran peaksanaan tugas;
i. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelola sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tercapainaya tertib administrasi;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat ;dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetaokan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan kebijakan pengarusutamaan gender;
g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

j. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan palaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender;
k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk perencanaan program ke depan;
l. Menyiapkan rumusan kebijakan, forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,sosial,politik hukum dan kualitas keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan validitas data dan informasi;

n. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wadah pembinaan;
q. Menyiapkan standarisasi lembaga penyelia layanan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman lembaga pengarusutamaan gender ;
r. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyelia layanan peningkatan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kesetaraan gender;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas keluarga, Data dan Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
t. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data dan Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Program; dan

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, data dan Informasi terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mendiditribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberkan dapat dijalankan efektif dan efisien;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;'

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyiapkan perumusan kebijakan pemebuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga penerapan dan pelayanan terlaksana dengan baik;
f. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembanguan harus responsive terhadap kepentingan anak;
g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembanguan harus responsive terhadap kepentingan anak;
h. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembanguan harus responsive terhadap kepentingan anak

i. Menyiapkan fasilitasi, sosial dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga integrasi pemenuhan hak anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembanguan telah responsive terhadap kepentingan anak, penyediaan sarana dan prasarana;
j. Menyiapkan bahan pemberian sosialisasi, pembinaan, penyuluhan,orientasi,seminar serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak dapat terpenuhi;
k. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat sebagai bahan kajian dan monitoring serta berkelanjutan program dan kegiatan apakah telah dapat memenuhi pemenuhan hak anak menuju Kota layak Anak;

l. Melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan penguatan dan pengembangan layanan peningkatan kualitas hidup anak, memfasilitasi pemenuhan hak anak dengan melaksanakan lomba, mimbar anak, supercamp, peringatan HAN, Denpasar festival, penampilan seni baik di dalam dan luar daerah, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga kreatifitas dalam pemenuhan hak anak dapat perpenuhi;

m. Melaksanakan pelayanan pengasuhan alternative, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa pelatihan ketrampilan bahasa, seni dan budaya, berekreasi, kegiatan lomba, penampilan seni anak baik di dalam dan luar daerah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak sehingga pengetahuan, kreativitas dan daya imajinasi anak dapat berkembang;

n. Melaksanakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi melalui KIE dan Advokasi pemenuhan hak anak melalui media cetak, media elektronik, pembinaan, ceramah, penyuluhan, seminar orientasi pemenuhan sarana dan prasarana serta tempat bermain anak, pemenuhan akta kelahiran, kartu identitas

anak, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta hak anak berpendapat, ajang curhat anak, ajang bermain anak, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan pemahaman dan partisipasi baik anak, keluarga, swasta/dunia usaha, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat terhadap pemenuhan hak anak dapat terwujud;

o. Melaksanakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan menjamin kelangsungan hidup ibu bayi dan anak, menjamin kualitas tumbuh kembang balita, anak usia sekolah, meningkatkan upaya perlindungan kesehatan dan partisipasi anak, menjamin pendewasaan usia perkawinan, pemenuhan ASI eksklusif, pojok ASI, perilaku hidup bersih dan sehat, pengenalan senam karakter, pengenalan alat permainan edukatif, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan kesejahteraan dapat segera terwujud;

p. Melaksanakan kegiatan bersama pusat pelayanan keluarga ( PUSPAGA ) untuk memberikan parenting, dan layanan konseling, kepada orang tua, anak, guru, dan masyarakat, stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga di harapkan pemahaman mereka meningkat;

q. Menyiapkan sarana prasarana bagi anak seperti perpustakaan/pojok baca anak, taman/kebunanak, desa ramah anak, zona aman sekolah, serta sarana prasarana lainnya untuk anak yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, dunia usaha, Desa/

Kelurahan, serta masyarakat yang peduli terhadap kebutuhan anak sesuai prosedur yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak tercapai;

r. Meyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai prosedur yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak tercapai;
s. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan , pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlalu untuk pemenuhan hak anak;
t. Menyiapkan perumusann kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak anak;
u. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
v. Menyaipkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang dibidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
w. Menyaipkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di

bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

x. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;

y. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemebuhan hak anak;

z. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan renacan yang akan datang;

å. membuat laporan pelaksanaan tugas bidang bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan Tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi dilingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku mencapai target kinerja yang di harapkan;
   e. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemebrdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang tenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang tenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari rindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang tenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

j. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
m. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

n. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman ;
p. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman;
q. Menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyelia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas ;

r. Menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyelia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas ;
s. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan ;
t. Melaksanakan pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
u. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas ;
v. Membentuk forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak perlindungan khusus anak menyusun perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan ;

w. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

x. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas ;

y. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman;

z. Menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyelia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan ksusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas ;

aa. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

bb. Menyiapkan permusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

cc. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan , pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kelancaran pelaksanaan tugas;

dd. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;

ee. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

ff. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan infomasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

gg. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak susuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman;

hh. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan

tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

ii. Membuat laporan pelaksanaaan tugas Bidang Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak susuai dengan dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas bidang; dan

jj. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan mempunyai tugas :
   a. Menyusun renacana operasional dilingkungan Bidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kelapa Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dam Pengerakan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang di berikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dam Pengerakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dam Pengerakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
e. Melaksanakan program kegiatan sub bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
f. Melaksanakan perlindungan hak reproduksi individu (papsmear) sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
g. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak), program KRR masalah HIV-AIDS, program advokasi dan KIE sesuai prosedur yang berlaku agar target kinerja dapat tercapai;
h. Melaksanakan pengembanganpusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja ( KRR) serta mensosialisasikan KRR sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pemahaman remaja terhadap KRR meningkat;

i. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi remaja ( KRR), penyuluhan kepada institusi masyarakat (IMP), (PPKBD, Sub PPKBD dan Kader) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pemahaman institusi masyarakat meningkat;
j. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KRR yang mandiri, serta pengelolaan data dan informasi program kepada ka.UPT, PLKB/PKB, IMP Faskes dan jejaring KB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kualitas data dan kemampuan pengelola data dan informasi program meningkat;
k. Menyusun kajian data dan informasi program sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan;
l. Melaksanakan perumusan kebijakan pedoman teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah tanggung jawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tugas :
   a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas kepada kepala kepala Seksi di lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
   c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi dilingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi , peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB , peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi sesuai prosedur agar target tercapai;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KB) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana , penanggulangan masalah kesehatan reproduksi sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan kepada pimpinan;
h. Merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis daerah di b Bidang Keluarga Berencana serta pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di

bidang keluarga berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

i. Melaksanakan program Keluarga Berencana untuk pengendalian kelahiran dan menuju keluarga yang berkualitas sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
j. Melaksanakan program pelayanan kontrasepsi, penyediaan sarana dan prasarana KB, penyediaan alat kontrasepsi untuk menjamin dan peningkatan kepesertaan akseptor KB sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran tugas;
k. Melaksanakan pengumpulan program pengembangan dan pembinaan tumbuh kembang anak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan perencanaan kegiatan;
l. Melaksanakan program penyiapan tenaga pendampng kelompok bina keluarga untuk pelaksanaan kegiatan tribina dan UPPKS sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan perencanaan kegiatan;
m. Melaksanakan program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memahami kegiatan kesehatan dan tumbuh kembang anak;
n. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera sesuai dengan pedoman untuk kelancaran tugas;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

p. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana , Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah tanggung jawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

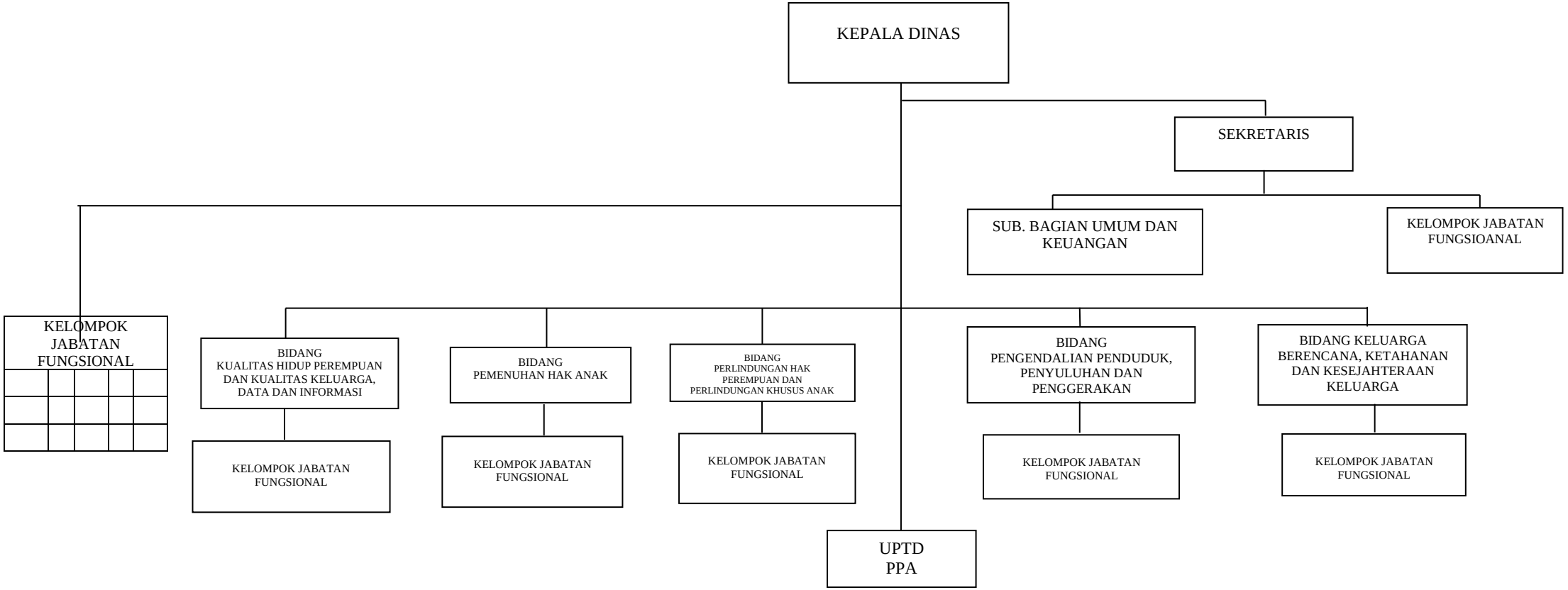

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Aparatur Sipil Negara pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar pada tahun 2021 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga orang) yang terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan Tenaga kontrak sebanyak 64 (enam puluh empat) orang.

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
**Perangkat Daerah DP3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2021**

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | SD | | | | 1 | 1 |
| 2 | SMP Sederajat | | - | 2 | - | 2 |
| 3 | SMA Sederajat | - | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 4 | D3 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | D4 | - | - | - | - | - |
| 6 | S1 | 4 | 24 | 18 | 13 | 59 |
| 7 | S2 | - | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 8 | S3 | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 4 | 32 | 33 | 24 | 93 |

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar sejumlah 1 orang, SMP sederajat 2 sejumlah orang, SMA Sederajat sejumlah 20 orang, D3 sejumlah 2 orang, S1 sejumlah 59 orang, S2 sejumlah 9 orang.

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**
**Perangkat Daerah DP3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2020**

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golongan I | - | - | - |
| 2 | Golongan II | - | 1 | 1 |
| 2 | Golongan III | 4 | 24 | 28 |
| 3 | Golongan IV | - | 7 | 7 |
| | JUMLAH | 5 | 8 | 36 |

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah pegawai Golongan II sejumlah 1 orang, Golongan III sejumlah 28 orang dan Golongan IV sejumlah 7 orang.

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3**
**Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan dan jenis Kelamin**
**Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun Tahun 2020**

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eselon I | - | - | - |
| 2 | Eselon II | - | 1 | 1 |
| 2 | Eselon III | - | 6 | 6 |
| 3 | Eselon IV | - | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 0 | 8 | 8 |

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Jenis Jabatan Perangkat DP3AP2KB Daerah Tahun 2021 adalah sejumlah 1 orang pegawai dengan jabatan Eselon II, 6 orang Eselon III dan 1 orang Eselon IV.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**
**Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2020**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak | |
| 1. | Bangunan 2 Unit | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Kendaraan roda 4 | 10 | 1 | 10 |
| 3. | Kendaraan Roda 2 | 63 | 0 | 63 |
| 4. | Mesin Ketik | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rak Besi Metal | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Filling Kabinet | 18 | 0 | 18 |
| 7. | White board | 9 | 0 | 9 |
| 8. | Lemari Kayu | 10 | 0 | 10 |
| 9. | Rak Kayu | 19 | 0 | 19 |
| 10. | Meja kayu/ Rotan | 8 | 0 | 8 |
| 11. | Kursi Besi | 10 | 0 | 10 |
| 12. | Kursi Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Meja rapat | 6 | 0 | 6 |
| 14. | Meja Telp | 3 | 0 | 3 |
| 15. | Meja Reception | 2 | 0 | 2 |
| 16. | Kursi Tamu | 7 | 0 | 7 |
| 17. | Kursi Putar | 13 | 0 | 13 |
| 18. | Kursi Biasa | 4 | 0 | 4 |
| 19. | Kursi Lipat | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Meja Computer | 16 | 0 | 16 |
| 21. | Meja Biro | 5 | 0 | 5 |
| 22. | Sofa | 3 | 0 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | Jam Elektronik | 5 | 0 | 5 |
| 24. | AC | 25 | 0 | 25 |
| 25. | Kipas Angin | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Televisi | 3 | 0 | 3 |
| 27. | Sound Sistem | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Loud Speker | 5 | 0 | 5 |
| 29. | Wireles | 3 | 0 | 3 |
| 30. | Mikrophone Floor Stand | 4 | 0 | 4 |
| 31. | Stabilalator | 2 | 0 | 2 |
| 32. | Tangga Almunium | 1 | 0 | 1 |
| 33. | Handy Cam | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Laptop | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Note Book | 15 | 0 | 15 |
| 36. | Printer | 29 | 0 | 29 |
| 37. | CPU | 5 | 0 | 5 |
| 38. | Meja Kerja Eselon II | 2 | 0 | 2 |
| 39. | Meja Kerja Eselon III | 5 | 0 | 5 |
| 40. | Meja Kerja Eselon IV | 11 | 0 | 11 |
| 41. | Meja Rapat Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| 42. | Meja tamu ruang tunggu | 1 | 0 | 1 |
| 43. | Meja Tamu eselon III | 5 | 0 | 5 |
| 44. | Kursi rapat Eselon II | 8 | 0 | 8 |
| 45. | Kursi Kerja Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| 46. | Kursi Kerja Eselon III | 5 | 0 | 5 |
| 47. | Kursi Kerja Eselon IV | 11 | 0 | 11 |
| 48. | Kursi Tamu eselon III | 5 | 0 | 5 |
| 49. | Camera + Attachment | 4 | 0 | 4 |
| 50. | Peralatan Vidio Visual lainnya | 6 | 0 | 6 |
| 51. | Pesawat Telpon | 9 | 0 | 9 |
| 52. | Handy Talky | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Facximile | 1 | 0 | 1 |
| 54. | Lemari buku | 2 | 0 | 2 |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

Hasil pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menurut Urusan adalah sebagai berikut.

### 1. Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar selama tahun 2014 hingga 2018 konsisten berada pada kategori Nindya, kemudian berhasil mencapai kategori Utama (melebihi target mendapatkan kategori Nindya) pada tahun 2019. Kategori Skor KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ditunjukkan pada tabel 2.3.1.

**Tabel 2.3.1**
**Kategori Skor KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

| Skor | Kategori |
|---|---|
| 500-600 | Pratama |
| 601-700 | Madya |
| 701-800 | Nindya |
| 801-900 | Utama |
| 901-1000 | KLA |

*Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak*

Hal ini menandakan bahwa Kota Denpasar hampir mencapai KLA dengan meningkatkan indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, untuk kedepannya penguatan

kelembagaan dan hak anak harus terus ditingkatkan untuk mencapai sebuah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak. Capaian skor KLA Kota Denpasar ditunjukkan pada tabel 2.3.2.

**Tabel 2.3.2**
**Capaian Skor KLA Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019**

| No | Skor KLA | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Realisasi | % | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Utama | Utama |
| 2. | Target | % | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya |

*Sumber: LKjIP BPPKB Kota Denpasar 2015 2016 2017 dan LKPJ AMJ Kota Denpasar 2016 – 2021*

## 2. Persentase Terbentuknya Layanan Terpadu

Realisasi capaian Layanan terpadu cenderung Fluktuatif dari tahun 2016 sebesar 11 %, 2017 sebesar 16, 18 %, tahun 2018 menurun 14 % dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 19 % dan 27 %

## 3. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif

Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Denpasar hanya mencapai 2,2% atau hanya 1 orang perempuan diantara 45 orang anggota DPRD. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di kursi DPR meningkat menjadi sebesar 4,4% dan pada tahun 2020 menjadi 8,9%. Angka ini masih jauh di bawah target dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut berisi kewajiban kepengurusan tiap partai politik harus mencakup 30% perempuan. Pada masa yang akan datang diharapkan adanya dorongan akomodasi serta regulasi dari partai politik untuk membangun keinginan pribadi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan di kursi parlemen sangat penting karena penyusunan undang-undang di berbagai sektor terkait dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan target per tahun, proporsi perempuan di DPR di Kota

Denpasar secara konsisten memiliki angka capaian 100% selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 dan 200% pada tahun 2019.

**Tabel 2.3.3**
**Persentase Partisipasi Perempuan di DPR di Kota Denpasar Tahun 2014 – 2020**

| No | Indikator | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan | Jiwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | Jumlah anggota DPR | Jiwa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 8,8 |
| 4. | Target | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5. | Capaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 404 |

Perkembangan persentase partisipasi perempuan di DPR dibandingkan dengan target Kota Denpasar ditunjukkan pada gambar 2.3.1.

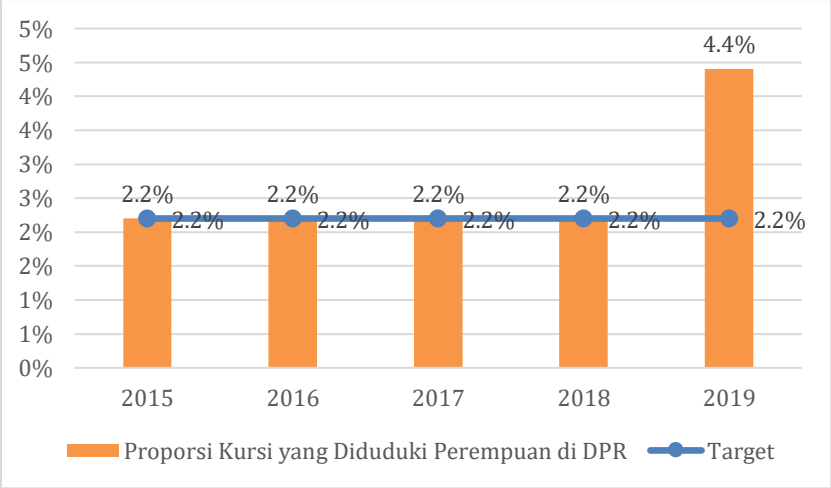


**Gambar 2.3.1**
**Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di DPR Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2015–2019**
*Sumber: Hasil Olahan, 2020*

## 4. Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung fluktuatif dengan jumlah kasus tertinggi pada Tahun 2020 mencapai 239 kasus. Peningkatan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 serta kemudahan akses yang

disediakan untuk pelaporan kasus bagi masyarakat. Jumlah kasus kekerasan pada UPTD PPA berdasarkan jenis kasus pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.3.4.

**Tabel 2.3.4**

**Kasus kekerasan pada UPTD PPA berdasarkan jenis kasus**

| No | Unit Pelayanan Terpadu | Jenis Kasus | Tahun | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | UPTD PPA Kota Denpasar | KDRT | 28 | 24 | 47 | 61 | 86 | 321 |
| | | SEKSUAL | 20 | 13 | 16 | 16 | 36 | 150 |
| | | ABH (Pelaku Anak) | 27 | 19 | 30 | 17 | 12 | 149 |
| | | PENELANTARAN | 15 | 17 | 17 | 12 | 33 | 112 |
| | | LAINNYA | 33 | 24 | 25 | 17 | 72 | 203 |
| **JUMLAH** | | | 123 | 97 | 135 | 123 | 239 | **935** |

*Sumber: Dinas PPAPPPKB Kota Denpasar*

## 5. Persentase sumbangan pendapatan perempuan

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, perkembangan persentase sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan angka yang fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,26%. Pada tahun 2020 persentase sumbangan pendapatan perempuan menurun menjadi 42,62%. Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kota Denpasar ditunjukkan pada Tabel 2.3.5.

**Tabel 2.3.5**

**Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kota Denpasar**

| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Proyeksi 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sumbangan pendapatan perempuan | 43,86 % | 42,18% | 47,26% | 42,62% | 53,36 % |

**6. Predikat evaluasi PUG**

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Denpasar mampu mempertahankan Predikat Evaluasi Pengarustamaan Gender pada tingkat Utama.

**7. Persentase Keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak**

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak cenderung meningkat. Pada tahun 2017 realisasi capaian adalah 55,5 % dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 60,5%. Realisasi capaian persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak signifikan di angka 70,5 %.

## 8. Angka unmetneed

*Unmet need* adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB, sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Berikut merupakan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kota Denpasar:

**Tabel 2.3.6.**
**Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)* di Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019**

| No | Indikator | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani | Pasangan | 3.682 | 5.441 | 7.377 | 6.266 | 6.990 | 6.512 | 6.355 |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur | Pasangan | 81.923 | 80.936 | 77.676 | 78.114 | 79.402 | 80.089 | 81.270 |
| 3. | Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 4,49 | 6,72 | 9,5 | 8,02 | 8,8 | 8,1 | 7,81 |
| 4. | Target | % | - | - | - | 9,12 | 9,12 | 9,21 | 9,21 |
| 5. | Capaian | % | - | - | - | 87,93 | 96,49 | 88,81 | 84,90 |

*Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2020*

Adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi menyebabkan upaya pengendalian penduduk terhambat. Pelayanan kesehatan KB yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran maupun pengendalian penduduk dinilai belum optimal. Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019 angka *unmetneed* Kota Denpasar mengalami

fluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2016 dan angka terendah berada pada tahun 2014.

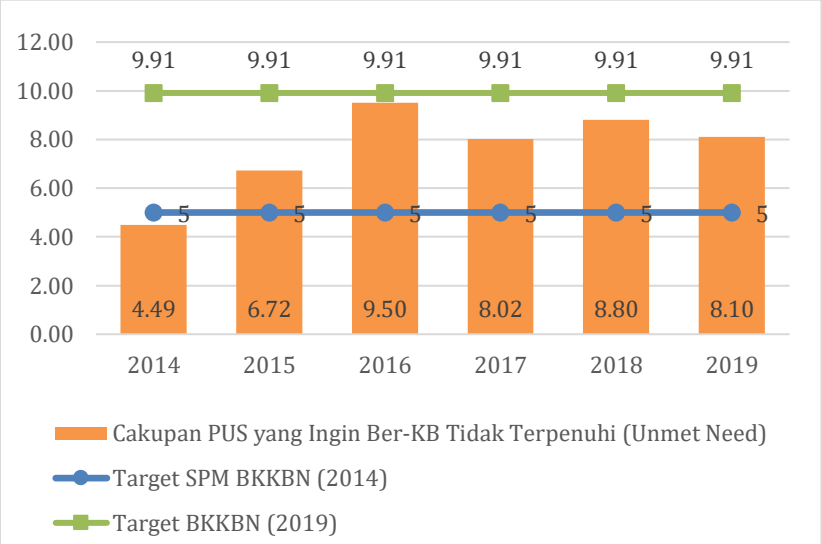


**Gambar 2.3.2**
**Perkembangan Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)***
**Kota Denpasar Dibandingkan Target BKKBN Tahun 2014 – 2019**
*Sumber: Hasil Olahan, 2020*

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN, pemerintah berusaha menurunkan angka ini menjadi 9,91% di tahun 2019, sedangkan dalam target BKKBN sesuai dengan target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota targetnya lebih tinggi lagi yaitu diturunkan hingga 5% di tahun 2014. Mengacu pada kedua target tersebut, selama tahun 2014 hingga tahun 2019 Kota Denpasar berhasil melebihi target BKKBN sesuai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018, namun belum dapat mencapai target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

**9. Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA**

Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan penyalahgunaan Napza cenderung meningkat sampai dengan Tahun 2020 yang mencapai 73%. Pada Tahun 2017 dan 2018 realisasi capaian mencapai 70% dan meningkat pada Tahun 2019 mencapai 72%. Peningkatan realisasi capaian juga terjadi pada Tahun 2020 mencapai 73% yaitu sesuai dengan target Renstra Dinas PPAPPPKB Kota Denpasar.

**10. Ratio petugas PPLKB/PLKB/PKB di 43 Desa Lurah**

Ratio petugas PPLKN/PLKB/PKB di 43 Desa Lurah telah sesuai dengan target mencapai 100% yaitu sebanyak 43 orang. Hal ini berarti setiap Desa Lurah di Kota Denpasar telah memiliki petugas PPLKB/PLKB/PKB masing-masing 1 orang atau sesuai dengan target.

**11. Persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data keluarga**

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data keluarga telah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase realisasi capaian adalah sebesar 25% dan menurun pada Tahun 2018 menjadi 23%. Selanjutnya realisasi capaian pada Tahun 2019 menurun menjadi 22 %, Tahun 2020 mencapai 20% dan diproyeksikan dapat menurun pada Tahun 2021 menjadi 10%. Penurunan persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan

dan penginputan data keluarga artinya semakin besarnya akurasi atau tingkat ketepatan data yang dihasilkan.

**12. Meningkatkanya nilai rata-rata PIK jalur Sekolah**

Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang lebih dikenal dengan PIK-R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. nilai rata-rata PIK jalur Sekolah Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, cenderung konsisten di angka 18 PIK RM

**13. Meningkatnya nilai rata-rata PIK jalur masyarakat**

Realisasi capaian nilai rata-rata PIK jalur Masyarakat selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2017 sampai 2018 terdapat 7 PIK (Pusat Informasi dan Konseling) yang meningkat menjadi 8 PIK di tahun 2019. Pada Tahun 2020, capaian nilai rata-rata PIK meningkat menjadi 9 PIK sesuai dengan target Renstra sebelumnya.

**14. Meningkatnya kunjungan BKB, BKR,BKL ke kelompok Tri Bina**

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, kunjungan BKB, BKR, BKL ke Kelompok Tri Bina cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, persentase tertinggi berhasil dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 83,78 %.

**15. Persentase Pemahaman Kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi**

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, Persentase pemahaman kader untuk membentuk BKB Holistik cenderung meningkat dari tahun 2016 dan 2017 dan konsisten di tingkat 70,5 % dari tahun 2018-2020.

**16. Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan**

Selama kurun waktu 2016-2020, Regulasi Pengendalian Kependudukan signifikan dengan jumlah 2 regulasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.7.

# Tabel 2. 3. 7

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra DP3AP2KB | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak | | | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Utama | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Utama | |
| 2 | Persentase terbentuknya layanan terpadu | | | na | 9% | 14% | 19% | 23% | 11 % | 16,18 % | 14% | 19% | 27% | |
| 3 | Persentase Perempuan di lembaga legislatif | | | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 6,7% | 2,2 % | 2,2% | 2,2% | 4,4% | 8,8% | |
| 4 | Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | 6,2% | 6,2% | 6,1% | 6% | 5,8% | 0,26 % | 0,6% | 6,1% | 6% | 5,8% | |
| 5 | Persentase sumbangan pendapatan perempuan | | | 43,83 % | 45,56% | 47,26% | 48,96% | 50,66% | 43,86 % | 42,18 % | 47,26% | 42,62% | 52,36 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Predikat evaluasi PUG | | | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | |
| 7 | Persentase Keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak | | | na | 55,5% | 60,5% | 70,5% | 70,5 % | - | 55,5% | 60,5% | 70,5% | 70,5 % | |
| 8 | Angka unmetned | | | 9,58 | 9,12 | 9,12 | 9,11 | 9,10 | 8,02 | 8,80 | 9,12 | 9,11 | 9,10 | |
| 9 | Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA | | | 70% | 70% | 72% | 73% | 75% | 70 % | 70% | 72% | 73% | 75% | |
| 10 | Ratio petugas PPLKB/PLKB/PKB di 43 Desa Lurah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | Persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data keluarga | | | 23% | 22% | 20% | 15% | 10% | 25 % | 23% | 22% | 20% | 10% | |
| 12 | Meningkatkanya nilai rata-rata PIK jalur Sekolah | | | 10 PIK | 18 PIK RM | 18 PIK RM | 18 PIK RM | 18 PIK RM | 10 PIK | 18 PIK RM | 18 PIK RM | 18 PIK RM | 18 PIK RM | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Meningkatnya nilai rata-rata PIK jalur masyarakat | | | 6 PIK | 7 PIK | 8 PIK | 9 PIK | 10 PIK | 7 PIK | 7 PIK | 8 PIK | 9 PIK | 10 PIK | |
| 14 | Meningkatnya kunjungan BKB, BKR,BKL ke kelompok Tri Bina | | | 83% | 83% | 83,50% | 83,78% | 85,78% | 83 % | 83,56 % | 83,50% | 83,78% | 85,78 % | |
| 15 | % Pemahaman Kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi | | | 55,5% | 60,5% | 70,5% | 70,5% | 70,5 % | 55,5% | 60,5% | 70,5% | 70,5% | 70,5 % | |
| 16 | Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan | | | na | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | - | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | |

# Tabel 2.3.8 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun2016-2020 (Renstra Periode yang Lalu)

| No | Program | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.515.299.600 | 1.931.522.500 | 2.471.295.800 | 2.610.873.650 | 2.342.076.302 | 1.379.779.639 | 1.818.348.689 | 2.376.088.247 | 2.479.794.968 | 2.281.486.003 | **91,06** | **94,14** | **96,15** | **94,98** | **97,41** |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 709.072.000 | 753.610.000 | 1.079.675.000 | 934.700.000 | 536.209.000 | 585.027.152 | 687.846.250 | 971.377.100 | 828.985.820 | 503.935.599 | **82,51** | **91,27** | **89,97** | **88,69** | **93,98** |
| 3 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 90.000.000 | 44.000.000 | 75.000.000 | 118.000.000 | - | 37.151.200 | 41.652.400 | 65.566.050 | 117.885.400 | - | **41,28** | **94,66** | **87,42** | **99,90** | **-** |
| 4 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 41.300.000 | 130.625.000 | - | - | 8.000.000 | 41.300.000 | 130.475.000 | - | - | 8.000.000 | **100,00** | **99,89** | **-** | **-** | **100,00** |
| 5 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1.004.800.000 | 1.739.825.000 | 1.679.795.350 | 1.442.162.500 | 58.000.000 | 979.327.060 | 1.696.034.858 | 1.466.424.600 | 1.338.009.950 | 54.300.000 | **97,46** | **97,48** | **87,30** | **92,78** | **93,62** |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 15.825.000 | 71.050.000 | 105.055.000 | 89.850.000 | - | 15.325.000 | 71.050.000 | 97.761.674 | 84.057.000 | - | **96,84** | **100,00** | **93,06** | **93,55** | **-** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | 82.925.000 | 54.800.000 | 213.769.750 | 305.950.000 | 33.540.000 | 77.875.100 | 51.950.000 | 194.910.447 | 300.587.200 | 32.340.000 | **93,91** | **94,80** | **91,18** | **98,25** | **96,42** |
| 8 | Perlindungan Anak | - | - | 153.795.000 | 869.975.000 | 145.745.000 | - | - | 143.092.869 | 849.966.796 | 145.733.000 | | **-** | **93,04** | **97,70** | **99,99** |
| 9 | Program Keluarga Berencana | 226.090.000 | 162.765.000 | 173.728.000 | 225.300.000 | 3.600.000 | 198.679.600 | 133.843.250 | 162.356.281 | 204.451.300 | 3.600.000 | **87,88** | **82,23** | **93,45** | **90,75** | **100,00** |
| 10 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 424.577.000 | 882.790.000 | 897.580.000 | 1.695.346.000 | 1.115.590.000 | 330.612.000 | 526.146.638 | 894.622.300 | 1.500.510.600 | 325.572.500 | **77,87** | **59,60** | **99,67** | **88,51** | **29,18** |
| 11 | Program Pelayanan Kontrasepsi | 154.130.800 | - | - | - | - | 152.800.800 | - | - | - | - | **99,14** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12 | Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelaynan KB/KR yang Mandiri | 522.966.400 | 494.719.000 | 134.790.000 | 156.177.500 | - | 362.137.600 | 481.306.300 | 113.542.000 | 148.892.099 | - | **69,25** | **97,29** | **84,24** | **95,34** | **-** |
| 13 | Program Pengembangan pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | 326.895.000 | 220.135.000 | 98.200.000 | 165.100.000 | - | 322.003.100 | 198.798.100 | 91.185.700 | 162.773.200 | - | **98,50** | **90,31** | **92,86** | **98,59** | **-** |
| 14 | Program Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 198.400.400 | 251.844.800 | 131.200.000 | 1.018.653.750 | 362.356.000 | 172.960.500 | 250.308.300 | 128.592.800 | 921.505.649 | 46.525.000 | **87,18** | **99,39** | **98,01** | **90,46** | **12,84** |
| 15 | Program Kebijakan Pengendalian kependudukan | - | - | - | 135.400.000 | - | - | - | - | 130.441.100 | - | **-** | **-** | **-** | **96,34** | **-** |
| 16 | Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan | 179.610.000 | 72.656.000 | 209.800.000 | - | - | 176.581.300 | 70.221.300 | 207.244.500 | - | - | **98,31** | **96,65** | **98,78** | **-** | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tumbuh Kembang Anak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pengembangan Model operasional BKB-Posyandu-PAUD | 170.230.000 | 104.820.000 | - | - | - | 169.013.100 | 85.649.300 | - | - | - | **99,29** | **81,71** | **-** | **-** | **-** |
| **Total** | | 5.662.121.200 | 6.915.162.300 | 7.423.683.900 | 9.767.488.400 | 4.605.116.302 | 5.000.573.151 | 6.243.630.385 | 6.912.764.568 | 9.067.861.082 | 3.401.492.102 | | | | | |

## Tabel 2.3.9
## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | Anggaran pada tahun 2021 | Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Per Mei) | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| **I** | **PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/** | | | |
| | **KOTA** | | | |
| **1** | KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | **352,940,622** | **116,107,900** | **32.90%** |
| | SUB KEGIATAN : | | | |
| | - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 297,817,954 | 91,902,400 | **30.86%** |
| | - PENYEDIAAN PERALATAN PERALATAN RUMAH TANGGA | 15,030,168 | 7,955,500 | **52.93%** |
| | - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 21,972,500 | 12,650,000 | **57.57%** |
| | - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD | 18,120,000 | 3,600,000 | **19.87%** |
| | | | | |
| **2** | KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | **1,792,320,960** | **670,520,044** | **37.41%** |
| | DAERAH | | | |
| | SUB KEGIATAN : | | | |
| | - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, AIR DAN LISTRIK | 125,800,000 | 26,034,564 | **20.70%** |
| | - PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 3,000,000 | **750,000.00** | **25.00%** |
| | - PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | 1,663,520,960 | 643,735,480 | **38.70%** |
| | | | | |
| **3** | KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN | **579,825,182** | 145,271,600 | **25.05%** |
| | PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | **SUB KEGIATAN :** | | | |
| | - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK | 32,650,000 | 14,353,800 | **43.96%** |
| | KENDARAAN PERORANGAN, DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | | | |
| | - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIJINAN | 456,130,000 | 130,917,800 | **28.70%** |
| | KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | | | |
| | - PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA | 91,045,182 | - | **0.00%** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II | **PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | |
| **4** | KEGIATAN : PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP | 54,440,000 | **-** | **0.00%** |
| | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | |
| **5** | KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN | 201,784,500 | **-** | **0.00%** |
| | KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN | | | |
| | KABUPATEN | | | |
| | | | | |
| **6** | KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA | 80,399,980 | 4,260,000 | **5.30%** |
| | LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN | | | |
| | KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | |
| **III** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | |
| | KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK | 200,740,500 | - | **0.00%** |
| | YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | |
| **IV** | **PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | |
| **7** | KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 6,170,429,812 | 2,328,186,406 | **37.73%** |
| | | | | |
| **V** | **PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | |
| **8** | KEGIATAN : PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK | 74,328,000 | **-** | **0.00%** |
| | | | | |
| **9** | KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB | 351,262,000 | **-** | **0.00%** |
| | | | | |
| **10** | KEGIATAN : DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK | 820,478,000 | - | **0.00%** |
| | | | | |
| **11** | KEGIATAN : PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK | 471,346,000 | 23,875,000 | **5.07%** |
| | DI KAMPUNG KB | | | |
| | | | | |
| **VI** | **PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA** | | | |
| | **(KS)** | | | |
| **12** | KEGIATAN : PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN | 75,999,000 | **-** | **0.00%** |
| | KESEJAHTERAAN KELUARGA BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR DAN PEMBERDAYAAN | | | |
| | EKONOMI KELUARGA /UPPKS | | | |
| | | | | |
| **13** | KEGIATAN : ORIENTASI PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN | 487,320,000 | - | **0.00%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN | | | |
| | EKONOMI KELUARGA/UPPKS) | | | |
| | | | | |
| **14** | KEGIATAN : PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN | 185,630,000 | - | **0.00%** |
| | KESEJAHTERAAN KELUARGA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **11,899,244,556** | **3,288,220,950** | **27.63%** |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b) Kurangnya optimalnya peran Kelembagaan PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar dalam artian Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c) Kurang optimalnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender di Kota Denpasar.
d) Belum tersedianya data terpilah

e) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat, kepemimpinan dan peran perempuan dalam jabatan politik dan publik serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
f) Perlunya peningkatan Peran Ibu dalam pengasuhan Keluarga
g) Masih rendahnya pemberdayaan perempuan melalu kewirausahaan
h) Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran; Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah; sekolah ramah anak; pusat kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP),
i) Tingginya Kasus Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah public
j) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spectrum yang semakin luas
k) Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, . belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja da perawatan jangka panjang lansia serta belum optimalnya pemahaman keluarga tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana)
l) Penurunan penggunaan kontrasepsi modern Kebutuhan ber - KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani, dan program KB Pria yang masih rendah

m) Pengendalian penduduk belum maksimal ,Jumlah penduduk usia produktif dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia Non produktif akan memacu pertumbuhan ekonomi di suart wilayah ( Bonus Demografi )

n) Adanya Kesenjangan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) antara pedesaan dan perkotaan

o) Pendataan keluarga (PK) agar tata kelola data pemerintah belum menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menjadi dasar perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan tepat sasaran

p) Rendahnya pengetahuan remaja mengenai perilaku beresiko seperti seks pra nikah, pernikahan dini dan Napza

### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan Komisi pemilihan Umum ( KPU ) terkait tindak lanjut kebijakan 30 persen calon legislative
c. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Kebijakan pemerintah Darah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan Hak Anak di Tingkat Kota dan Kec, Desa/ Lurah

e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
g. Penguatan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif
h. Meningkatkan motivator otivator KB Pria dan Sosialisasi , Revitalisasi Program KB
i. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja
j. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan Keluarga
k. Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Isu–isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut.

**a. Permasalahan terkait dengan kesekretariatan :**

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Belum Optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar
3. Kurang memadai sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dians PPAPPKB Kota Denpasar
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang

5. Belum Optimalnya Kualitas administrasi, dokumen Keuangan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar

**b. Permasalahan terkait dengan kualitas hidup perempuan :**

1. Kurangnya optimalnya peran Kelembagaan PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar
2. Kurang optimalnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender di Kota Denpasar
3. Belum tersedianya data terpilah
4. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat, kepemimpinan dan peran perempuan dalam jabatan politik dan publik serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

**c. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan**

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spectrum yang semakin luas
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga

**d. Permasalahan yang terkait dengan Kualitas Keluarga :**

1. Perlunya peningkatan Peran Ibu dalam pengasuhan Keluarga
2. Belum optimalnya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

**e. Permasalahan yang terkait dengan Sistem Data Gender dan Anak:**

1. Rendahnya presentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak
2. Masih kurangnya data permasalahan perempuan dan anak

**f. Permasalahan yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Belum optimalnya Partisipasi anak dalam Pembangunan (partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan)
2. Masih adanya perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun
3. Keberadaan dan Pemanfaatan pojok ASI belum maksimal
4. Ketersediaan lembaga yang memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) kesehatan Psikologi dan mental belum memadai
5. Belum optimalnya sekolah Ramah Anak dan RBRA di kota Denpasar

**g. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Khusus Anak**

1. Tingginya Kasus Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik
2. Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti : pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus
3. Dampak pandemi covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan

dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.

4. Adanya pengaruh pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja
5. Belum optimalnya PATBM di Kota Denpasar

**h. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Penduduk**

1. Belum adanya kajian pengendalian penduduk

**i. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB)**

1. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
2. Kebutuhan ber - KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani
3. Partisipasi KB Pria yang masih rendah
4. Jumlah penduduk usia produktif dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia Non produktif akan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Bonus Demografi)
5. Adanya Kesenjangan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) antara pedesaan dan perkotaan
6. Pendataan keluarga (PK) agar tata kelola data pemerintah belum menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
7. Rendahnya pengetahuan remaja mengenai perilaku beresiko seperti seks pra nikah, pernikahan dini dan Napza
8. Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja masih perlu di tingkatkan

**j. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Sejahtera**

1. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga
2. Belum optimalnya Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa
3. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja da perawatan jangka panjang lansia
4. Belum optimalnya pemahaman keluarga tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

## 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU".** Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026, yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: "Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana". Kota yang dimaksud dalam RPJPD adalah budaya yg bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak lagi sesuai dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertical ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa memastikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan focus RPJMD periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arah RPJPD, focus RPJMD periode Tahun 2021-2026 dan guna mwujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan,dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali,

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan bertujuan meningkatkan kualias pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan,dan Kesiapsiagaan Bencana bertjuan Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masYarakat, ketahanaan pangan dan meningkatkan sesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ) bertujuan optimalisasi pelayanan publik
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, bertujuan mewujudkan SDM yang unggul, mengoptimalkan pemanpaatan teknologi, mewujudkan keseimbangan pembangunan
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali, bertujuan Meningkatkan penguatan jati diri masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mendukung pencapaian **misi ke 5 "Penguatan Jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali".** Adapun tujuan yang terkait

dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dan strategi Meningkatkan kesetaraan gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi: misi ke 5 "Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali"<br><br>Tujuan: Meningkatkanya kemampuan masyarakat Meningkatkan Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali<br><br>Sasaran: Meningkatnya kesetaraan gender | ➢ Baru 50 % OPD yang terlibat dalam pelaksanaan PPRG; (2) Komposisi ARG daLam Belanja Langsung APBD masih dibawah 30 %<br>➢ Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya<br>➢ Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT<br>➢ Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga<br>➢ Belum Optimalnya Kelembagaan PUG<br>➢ Tersedianya data terpilah belum maksimal<br>➢ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan<br>➢ Belum optimalnya | ➢ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.<br>➢ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender<br>➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>➢ Masih rendahakan | ➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan<br>➢ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A<br>➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga<br>➢ rendahnya presentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak<br>➢ belum optimalnya PHA di Kota Denpasar<br>➢ belum terbentuknya FAD di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan<br>➢ Belum optimalnya sekolah Ramah Anak/RBRA di kota Denpasar<br>➢ belum optimalnya PATBM di Kota Denpasar<br>➢ Belum adanya kajian pengendalian penduduk<br>➢ Rendahnya pengetahuan masyarakat ttg pelayanan KB<br>➢ masih rendahnya PUS ttg PKBR<br>➢ belum maksimalnya ratio PKB dengan jumlah Desa/kelurahan<br>➢ masih rendahnya pengetahuan dan informasi KB pria<br>➢ belum optimalnya pemanfaatan Poktan Tri Bina<br>➢ belum optimalnya pembentukan PIK R di Desa/Kel | pengetahuan dan kesadaran remaja tentang KRR dan KB<br>➢ Belum optimalnya pemamfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB<br>➢ Belum adanya kajian pengendalian penduduk | ➢ Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana<br>➢ Meningkatkan motivator KB pria dan sosialisasi<br>➢ Meningkatkan pemahaman dan peran keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera |

### 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali

Rancangan Awal Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar mewajibkan mampu menjabarkan agenda pembangunan nasional, visi dan misi Kementerian, visi dan misi Gubernur Bali, serta

mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan daerah yang berkembang. Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pemerintah Kota Denpasar tidak dapat terlepas pula dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pada tingkat atas, seperti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Telaahan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu Renstra Kementerian PPPA, Renstra Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali dan Renstra BKKBN.

### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Dalam menelaah Rancangan Awal Renstra ini mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memperhatikan visi dan misi Presiden, Kementerian PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak; dan

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### 3.3.2 Telahaan Renstra Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   1) Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

      Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   1) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasu TPPO. Capaian sasaranini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Perbandingan antarajumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

2) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3) Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja perempuan Indonesia Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase calon tenaga kerjaperempuan yang memperoleh pelatihan ketrampilan yang bersertifikat.

4) Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus (SDKK) bagi perempuan Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:Persentase perempuan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik, dalam situasi darurat dan kondisi khusus (SDKK) yang mendapat perlindungan.

c. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indicator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak; danPersentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi danlembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

### 3.3.3 Telahaan Renstra BKKBN

Dalam menelaah Rancangan Awal Renstra ini tidak terlepas pula mengacu pada Renstra BKKBN, yaitu "Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Visi tersebut mengandung pengertian:

1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.
2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan

TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Dan tidak terlepas pula pada tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disebutkan 7 Agenda Pembangunan Nasional. Salah satu agenda dalam Pembangunan Nasional yang menjadi acuan

dalam penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar adalah Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-1 yaitu "Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan", Kegiatan Prioritas (KP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda".

## 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha dan merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata termuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia

Pesatnya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memberikan kontribusi dalam terciptanya lapangan kerja dan investasi, pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke pulau Bali terutama pada wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari wilayah Bali maupun luar wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah

menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung dan daya tamping seperti: meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; meningkatnya instrusi air laut kedaratan, menurunnya debit air dan air permukaan, meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali. Hak tersebut menyebabkan kerentanan ekologi Bali semakin tinggi yang bermuara pada makin rendahnya daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk mendukunag kegiatan sosial ekonomi dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah di Provnsi Bali. Jika keseimbangan ekosistem tersebut terganggu, maka keunggulan bersaing Bali dari sektor pariwisata akan menurun, dan Bali akan ditinggalkan. Neraca lahan atau penatagunaan tanah di Provinsi Bali belum pernah dihitung, namun dapat diperkirakan bahwa tutupan lahan hutan, perkebunan, persawahan terus mengalami penurunan. Target kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) berdasarkan arahan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum bisa terpenuhi. Kebijakan minimal alih fungsi lahan pertanian sawah sebesar10% dari luas sawah yang ada sesuai arahan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, kecendrungan sulit terpenuhi, terlebih belum ditetapkannya sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai

arahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan isu Strategis:

1. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.
2. Rendahnya Pemahaman SDM tentang Keluarga Berkualitas dan Pengendalian Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut.

Tujuan :

1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta Mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).

Sasaran :

1) Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak
2) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan
3) Meningkatkan Keluarga Berkualitas

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebelum dan setelah perubahan di sajikan pada tabel. 4.1 dan 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebelum perubahan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. | Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak | Rasio kekerasan terhadap anak | Angka | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| | Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Angka | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| | Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak | Predikat Kota , Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak | Predikat | utama | utama | utama | utama | utama | KLA |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks IPA | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG ) | Indeks IPG | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks IDG | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang | Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR) | Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR) | Persen | 57,18 | 57,18 | 57,25 | 57,50 | 57,75 | 58,00 |
| | Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility rate/TFR) | Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate/TFR) | Persen | 1,96 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,88 | 1,86 |

**Tabel 4.2**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar setelah perubahan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. | Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak | Predikat Kota , Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak | Predikat | utama | utama | utama | utama | KLA |
| | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG ) | Indeks IPG | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks IDG | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang | Meningkatkan Keluarga Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) | Indeks ibangga | 55,70 | 56,80 | 57,30 | 57,80 | 58,30 |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1) Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
2) Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
3) Menguatkan sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
4) Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
5) Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk

mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak; edukasi dan teregistrasi keberadaan dan Komitemen SRA dan meningkatkan sarpras, program dan kegiatan SRA,memberi edukasi dan teregistrasi kegiatan kreatif dan rekratif yang ramah anak , Daerah terkait, Kec, Desa/Kel, Dunia Usaha untuk bersinergi, memberi edukasi dan teregistrasi untuk meningkatkan keberadaan dan Pemanfaatan pojok ASI maksimal;

6) Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;
7) Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya
8) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
9) Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada

pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada day care/Tempat Penitipan Anak;memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) dan Kesehatan mental;

10) Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
11) Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT
12) Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
13) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
14) Menurunkan angka kelahiran total/ Total Fertility Rate

## 5.2 Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kebijakan dan regulasi, meningkatkan pemahaman terhadap Pemerintah, Dunia Usaha, pendidik dan media masa tentang pentingnya perlindungan khusus anak.
2) Meningkatkan peranan UPTD dalam sistem pelayanan yang mencangkup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilisasi sosial, serta pemulangan dan meningkatkan pengawasan.
3) Meningkatkan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
4) Kebijakan Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
5) Kebijakan Menguatkan sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
6) Kebijakan Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

7) Menguatkan kebijakan dan Regulasi, Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak,
8) Percepatan Kebijakan pemenuhan Hak Anak Kota, Desa/Lurah melului penguatan pelembagaan pemenuhan Hak Anak, dan pendampingan dalam perencanaan program kegiatan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasi
9) Meningkatkan Kebijakan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat Kota, Desa/Lurah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
10) Percepatan Kebijakan pemenuhan Hak Anak Kota, Desa/Lurah melului penguatan pelembagaan pemenuhan Hak Anak, dan pendampingan dalam perencanaan program kegiatan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasi
11) Meningkatkan Kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
12) Memperkuat Kebijakan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

13) Peningkatan Kebijkan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
14) Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
15) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG),
16) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan.
17) Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan, Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT
18) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha;
19) Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas melalui pola asuh, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan perawatan ramah lansia

20) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dengan sasaran akseptor KB, keluarga peserta MKJP
21) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
22) Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GSPK)
23) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data / informasi program bangga kencana berbasis teknologi informasi
24) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)
25) Peningkatan Kualitas Aparatur dengan fokus pada pengembangan SDM, Penyediaan Sarpras dan Optimalisasi peran pegawai dalam mencapai kinerja.

Keterkaitan antar strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

## Tabel 5.1

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

| **VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU** | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi : Penguatan Jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. | Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak | Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di lembaga, pemerintah , Dunia Usaha di Kota Denpasar, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya; | Percepatan Kebijakan pemenuhan Hak Anak Kota, Desa/Lurah melului penguatan pelembagaan pemenuhan Hak Anak, dan pendampingan dalam perencanaan program kegiatan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasi |
| | | Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak ; Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan | Meningkatkan kebijakan dan regulasi, meningkatkan pemahaman terhadap Pemerintah, Dunia Usaha, pendidik dan media masa trntang pentingnya perlindungan khusus anak. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Memperkuat lembaga UPTD PPA, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan serfikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; dan Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak. | Meningkatkan peranan UPTD dalam sistem pelayanan yang mencangkup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilisasi sosial, serta pemulangan dan meningkatkan pengawasan. |
| | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan | Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; | Kebijakan Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; |
| | | Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. | Kebijakan Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; | Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; |
| | | Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lembaga, pemerintah kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya; | Percepatan Kebijakan pelaksanaan PUG di lembaga, pemerintah kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), |
| | | Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan; | Kebijakan Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan. |
| | | Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. | Memperkuat Kebijakan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. |
| | | Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT | Percepatan kebijakan Peningkatan kapasitas peran Puspaga dalam Pendampingan IRT dalam pengasuhan , Melaksanakan kegiatan pendampingan pengasuhan, Pelatihan, Workshop bagi IRT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang | Meningkatkan Keluarga Berkualitas | Meningkatkan kesadaran masyarakat | Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kota Denpasar dengan kecamatan, desa/lurah dalam rangka pengendalian; meningkatkan mekanisme operasional penggerakan lini lapangan, mengimplementasikan 8 dimensi ibangga (Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan) |
| | | Menurunkan angka kelahiran total/ Total Fertility Rate | Meningkatkan pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraception Prevalance Rate/ MPCR) |

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

## 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana dan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar adalah sebanyak 10 program dan 29 kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

   Kegiatan :

   1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

2) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

   Kegiatan :

   1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

5) Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan:

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/ Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7) Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk.
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

9) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Matrik Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Dana Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebelum dan setelah perubahan tercantum dalam Tabel 6.1 dan 6.2.

# TABEL 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sebelum Perubahan

| Sasaran | Kode | | | | | Program /Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra pada Akhir Periode Renstra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak** | | | | | | | **Rasio kekerasan terhadap Anak** | **0,033** | **0,033** | **228,916,000** | **0,032** | **236,216,000** | **0,032** | **324,837,600** | **0,032** | **357,321,360** | **0,032** | **393,053,496** | **0,032** | **1,540,344,456** |
| | **2** | **8** | **7** | | | **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif** | 100% | 100% | **228,916,000** | 100% | **236,216,000** | 100% | **324,837,600** | 100% | **357,321,360** | 100% | **393,053,496** | 100.000% | 1,540,344,456 |
| | **2** | **8** | **7** | **2.01** | | Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 4 kec | **68,700,000** | | **76,000,000** | | **83,600,000** | | **91,960,000** | | **101,156,000** | | 421,416,000 |
| | 2 | 8 | 7 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Sosialisasi GN-AKSA Terlaksananya Parenting tentang Narkoba | | | 68,700,000 | | 76,000,000 | | 83,600,000 | | 91,960,000 | | 101,156,000 | | 421,416,000 |
| | **2** | **8** | **7** | **2.02** | | Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan | 200 Orang | | **55,000,000** | | **60,000,000** | | **65,000,000** | | **71,500,000** | | **78,650,000** | | 215,150,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **8** | **7** | **2.02** | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anakk Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah korban kekerasan anak yang didampingi | | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 65,000,000 | | 71,500,000 | | 78,650,000 | | 215,150,000 |
| | **2** | **8** | **7** | **2.03** | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | 4 kec | **160,216,000** | | **160,216,000** | | **176,237,600** | | **193,861,360** | | **213,247,496** | | 903,778,456 |
| | 2 | 8 | 7 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Kader/Aktivis PATBM di Desa/Lurah Terlaksananya Sistem Perlindungan Anak di Desa/Lurah | | | 160,216,000 | | 160,216,000 | | 176,237,600 | | 193,861,360 | | 213,247,496 | | 903,778,456 |
| **Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban** | | | | | | | **Rasio kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO** | **0.29** | **0.29** | **404,610,363** | **0.28** | **455,000,000** | **0.28** | **545,000,000** | **0.27** | **589,550,000** | **0.27** | **642,785,000** | **0.27** | **2,477,945,363** |
| | **2** | **08** | **03** | | | **Program Perlindungan Perempuan** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif** | 100% | 100% | **404,610,363** | 100% | **455,000,000** | 100% | **545,000,000** | 100% | **589,550,000** | 100% | **642,785,000** | 100% | **2,477,945,363** |
| | **2** | **08** | **03** | **2.01** | | Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | **160 Orang** | | **105,000,000** | | **120,000,000** | | **132,000,000** | | **145,200,000** | | 159,000,000 | | 502,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **kekerasan dan TPPO** | **2** | **08** | **03** | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Sosialisasi Three Ends | | | 105,000,000 | | 120,000,000 | | 132,000,000 | | 145,200,000 | | 159,000,000 | | 661,200,000 |
| | **2** | **08** | **03** | **2.02** | | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 Orang | | **156,960,363** | | **175,000,000** | | **242,000,000** | | **261,250,000** | | **287,375,000** | | 1,122,585,363 |
| | **2** | **08** | **03** | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pendampingan Kasus Perempuan Korban Kekerasan, Jumah tersedianya Data Terpilah Kasus yang ditangani dan yang didampingi | | | 40,000,000 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 55,550,000 | | 61,105,000 | | 261,655,000 |
| | **2** | **08** | **03** | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Sosialisasi Kekerasan dalam rumah tangga | | | 152,960,363 | | 170,000,000 | | 187,000,000 | | 205,700,000 | | 226,270,000 | | 941,930,363 |
| | **2** | **08** | **03** | **2.03** | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | **142,650,000** | | **160,000,000** | | **171,000,000** | | **183,100,000** | | **196,410,000** | | 853,160,000 |
| | **2** | **08** | **03** | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 250,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah peserta Rapat Koordinasi TPPO | | | 92,650,000 | | 110,000,000 | | 121,000,000 | | 133,100,000 | | 146,410,000 | | 603,160,000 |
| **Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak** | | | | | | | **Predikat Kota, Kecamatan, Desa /lurah Layak Anak** | **Utama** | **Utama** | **1,290,100,000** | **Utama** | **1,419,110,000** | **Utama** | **1,561,021,000** | **Utama** | **1,717,123,100** | **KLA** | **1,888,835,410** | KLA | 7,876,189,510 |
| | | | | | | | **Indeks Perlindungan Anak ( IPA** | **NA** | **68** | | **70** | | **72** | | **74** | | **75** | | 75 | |
| | **2** | **08** | **06** | | | **Program Pemenuhan Hak Anak** | Cakupan Indikator KLA | Utama | Utama | **1,290,100,000** | Utama | **1,419,110,000** | Utama | **1,561,021,000** | Utama | **1,717,123,100** | KLA | **1,888,835,410** | KLA | 7,876,189,510 |
| | **2** | **08** | **06** | **2.01** | | Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **597,800,000** | | **657,580,000** | | **723,338,000** | | **795,671,800** | | **875,238,980** | | 3,649,628,780 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konvensi Hak Anak (KHA) di Desa/Kelurahan Terlaksananya Sosialisasi PHA, terlaksananya sosialisasi sekolah ramah anak ( SRA )Terlaksananya Kegiatan HAN, Terlaksananya kegiatan Supercamp | | | 135,100,000 | | 148,610,000 | | 163,471,000 | | 179,818,100 | | 197,799,910 | | 824,799,010 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 462,700,000 | | 508,970,000 | | 559,867,000 | | 615,853,700 | | 677,439,070 | | 2,824,829,770 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **692,300,000** | | **761,530,000** | | **837,683,000** | | **921,451,300** | | **1,013,596,430** | | 4,226,560,730 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **08** | **06** | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 92,500,000 | | 101,750,000 | | 111,925,000 | | 123,117,500 | | 135,429,250 | | 564,721,750 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 124,250,000 | | 136,675,000 | | 150,342,500 | | 165,376,750 | | 181,914,425 | | 758,558,675 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 217,750,000 | | 239,525,000 | | 263,477,500 | | 289,825,250 | | 318,807,775 | | 1,329,385,525 |
| | **2** | **08** | **06** | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 257,800,000 | | 283,580,000 | | 311,938,000 | | 343,131,800 | | 377,444,980 | | 1,573,894,780 |
| **Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan** | | | | | | | **Indeks Pembangunan Gender (IPG )** | **97,77** | **97,77** | **1,135,793,750** | **97,77** | **1,883,160,000** | **97,77** | **2,444,676,000** | **97,77** | **2,640,073,600** | **97,77** | **2,884,418,961** | **97,77** | **10,988,122,311** |
| | | | | | | | **Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG )** | **62,16** | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | |
| | **2** | **08** | **02** | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Anggaran responsif gender pada Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan | 10% | 20% | 830,975,000 | 20% | 1,328,762,500 | 50% | 1,458,638,750 | 60% | 1,598,502,625 | 75% | 1,749,352,888 | 75% | 6,966,231,763 |
| | | | | | | | Persentase Anggaran responsif gender pada Belanja APBD | 20% | 20% | | 20% | | 50% | | 60% | | 75% | | 75% | |
| | | | | | | | Persentase partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Soaial dan Ekonomi | 9,8% | 9,8% | | 9,8% | | 9,8% | | 9,8% | | 9,8% | | 9,8 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **08** | **02** | **2.01** | | Kegiatan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak | | | 552,100,000 | | 692,000,000 | | 761,200,000 | | 837,320,000 | | 921,052,000 | | 3,763,672,000 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.01** | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah koodinasi ke Kemen PPPA | | | - | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,500,000 | | 66,550,000 | | 232,050,000 |
| | **2** | **08** | **02** | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi PUG | | | - | | 30,000,000 | | 33,000,000 | | 36,300,000 | | 39,930,000 | | 139,230,000 |
| | **2** | **08** | **02** | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Advokai Driver, Pelatihan Penguatan Kelembagaan PUG bagi lembaga Driver,Advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG,Pelatihan PPRG bagi perencana dan Focal Point OPD, Pelatihan PPRG bagi Perencana/Focal Point Desa Pelatihan PPRG bagi Auditor/ P2UPD, Workshop PPRG Desa | | | 214,787,500 | | 240,000,000 | | 264,000,000 | | 290,400,000 | | 319,440,000 | | 1,328,627,500 |
| | **2** | **08** | **02** | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah sosialisasi Perda PUG, Penilalian Gender Equality Awerd Tingkat OPD, Tingkat Desa/ Kelurahan , Penilaian Gender Champion, | | | 337,312,500 | | 372,000,000 | | 409,200,000 | | 450,120,000 | | 495,132,000 | | 2,063,764,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penilaian valuasi PUG | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **08** | **02** | **2.02** | | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **278,875,000** | | **306,762,500** | | **337,438,750** | | **371,182,625** | | **408,300,888** | | 1,702,559,763 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.02** | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta Pelatihan Kepemipinan dan Piblik Speaking bagi kader potensial perempuan parpol, Pelatihan digitalisasi UMKM perempuan, penyuluhan potensi kewirausahaan perempuan, seminar peringatan hari ibu | | | **278,875,000** | | 306,762,500 | | 337,438,750 | | 371,182,625 | | 408,300,888 | | 1,702,559,763 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.02** | 02 | Advokasi Kebijakan dan PendampinganPeningkatan partisipasi perenmpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta FGD peningkatan kapasitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, Bimtek PUG bagi kader perempuan potensi parpol, Pemberdayaan organisasi perempuan, Penyusunan buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar | | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **08** | **02** | **2.03** | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | 330,000,000 | | 360,000,000 | | 390,000,000 | | 420,000,000 | | 1,500,000,000 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.03** | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.03** | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| | **2** | **08** | **02** | **2.03** | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| | **2** | **08** | **05** | | | Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | Persentase data terpilah Gender dan Anak pada OPD | 10% | 20% | 152,167,500 | 30% | 274,397,500 | 50% | 301,837,250 | 60% | 332,020,975 | 75% | 365,223,073 | 75% | 1,425,646,298 |
| | **2** | **08** | **05** | **2.01** | | Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembuatan Profil Statistik Gender | | | 152,167,500 | | 274,397,500 | | 301,837,250 | | 332,020,975 | | 365,223,073 | | **1,425,646,298** |
| | **2** | **08** | **05** | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah rapat penyusunan Profil statistik Gender, Penyusunan Profil Statistik Gender, Profil Daerah Responsif Gender, Bimtek penyusunan data terpilah OPD, Penguatan Sistem data Gender dan anak | | | 105,397,500 | | 222,397,500 | | 244,637,250 | | 269,100,975 | | 296,011,073 | | **1,137,544,298** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **08** | **05** | 2.01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi data Terpilah dalam buku publikasi Daerah Dalam Angka, Sosialisasi data Terpilah pada Sistem data Desa/Keluarahan, Rapat Forum Data, Sosialisasi dan Identifikasi Data Terpilah di OPD, Advokasi Data terpilah menjadi bagian dari Penyusunan Perencanaan | | | 46,770,000 | | 52,000,000 | | 57,200,000 | | 62,920,000 | | 69,212,000 | | **288,102,000** |
| | **2** | **08** | **04** | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa Lurah) | n/a | 4,6% | 152,651,250 | 6,9% | 280,000,000 | 6.9% | 684,200,000 | 9.3% | 709,550,000 | 9.3% | 769,843,000 | 9.3% | **2,596,244,250** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.01 | | Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | **81,890,000** | | **97,000,000** | | **106,700,000** | | **112,420,000** | | **114,000,000** | | **512,010,000** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangaan Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 0 | | 0 | | | | | | | | **0** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan edukasi KG dan Perlindungan anak bagi Keluarga | Jumlah Pembinaan Pola Asuh, Pelatihan Konseling Bagi Ibu Rumah Tangga | | | 40,000,000 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 55,550,000 | | 57000000 | | **257,550,000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **08** | **04** | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta Sosialisasi Peran IRT dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera | | | 41,890,000 | | 47,000,000 | | 51,700,000 | | 56,870,000 | | 57000000 | | **254,460,000** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.02 | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota | Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya | | | **70,761,250** | | **129,000,000** | | **518,100,000** | | **531,790,000** | | **583,969,000** | | **1,833,620,250** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.02 | 01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 65,000,000 | | **230,000,000** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.02 | 02 | Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah kabupaten/kota | | | | 33,892,500 | | 38,000,000 | | 418,000,000 | | 422,180,000 | | 464,398,000 | | **1,376,470,500** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.02 | 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota | | | | 36,868,750 | | 41,000,000 | | 45,100,000 | | 49,610,000 | | 54,571,000 | | **227,149,750** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.03 | | Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota | Cakupan Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota | | | 0 | | 54,000,000 | | 59,400,000 | | 65,340,000 | | 71,874,000 | | **250,614,000** |
| | **2** | **08** | **04** | 2.03 | 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan Anak yang | | | | 0 | | 54,000,000 | | 59,400,000 | | 65,340,000 | | 71,874,000 | | **250,614,000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility rate/TFR)** | | | | | | | **Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate/TFR)** | **1.96** | **1.96** | **348,850,000** | **1.94** | **431,800,000** | **1.92** | **470,300,000** | **1.88** | **441,650,000** | **1.86** | **557,065,000** | **1.86** | **2,249,665,000** |
| | 2 | 14 | 02 | | | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. | 2,3 % | 2,3 % | 348,850,000 | 2,3 % | 431,800,000 | 2,3 % | 470,300,000 | 2,3 % | 441,650,000 | 2,3 % | 557,065,000 | 2,3 % | 2,249,665,000 |
| | | | | | | | Persentase Kelompok kerja bangga kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang efektif | 9,3 % | 9,3% | | 9,3% | | 9,3% | | 13.00% | | 13.00% | | 13% | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 348,850,000 | | 381,800,000 | | 415,300,000 | | 451,950,000 | | 492,065,000 | | 2,089,965,000 |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Tersedianya jenis data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | - |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Profil kependudukan yang diadakan | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah peserta sosialisasi rumah data kependudukan di kampung KB, advokasi dan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK, sosialisasi pendidikan kependudukan di sekolah, orientasi devinfo bagi peugas pengelola pogram KKBPK, rapat pengendalian kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, pendidikan kependudukan bagi kader di kampung KB, sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di kampung KB | | | 284,050,000 | | 315,000,000 | | 346,500,000 | | 381,150,000 | | 419,265,000 | | 1,745,965,000 |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 64,800,000 | | 66,800,000 | | 68,800,000 | | 70,800,000 | | 72,800,000 | | 344,000,000 |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,500,000 | | 65,000,000 | | 230,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguan Kependudukan ( GDPK ) tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah buku Pemanfaatan Grand Design Pembanguan Kependudukan ( GDPK ) tingkat Kabupaten/ Kota | | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,500,000 | | 65,000,000 | | 230,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR)** | | | | | | | **Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR)** | **57.18** | **57.18** | **3,352,457,500** | **57.25** | **3,810,154,000** | **57.50** | **4,179,854,000** | **57.75** | **4,489,104,000** | **58.00** | **4,810,184,000** | **58.00** | **20,641,753,500** |
| | 2 | 14 | 03 | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB ) | Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terlayani ( Unmetneed ) | 7,81 | 7,81 | 2,374,917,500 | 7,60% | 2,765,580,000 | 7,53% | 2,988,580,000 | 7,40% | 3,222,480,000 | 7,38% | 3,466,870,000 | 7,38% | 14,818,427,500 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 919,180,000 | | 985,580,000 | | 1,053,580,000 | | 1,128,180,000 | | 1,206,440,000 | | 5,292,960,000 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | 210,775,000 | | 212,775,000 | | 214,775,000 | | 216,775,000 | | 218,775,000 | | 1,073,875,000 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya lokal | | | | 25,000,000 | | 27,500,000 | | 29,500,000 | | 31,500,000 | | 33,000,000 | | 146,500,000 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 70,640,000 | | 72,640,000 | | 75,640,000 | | 78,640,000 | | 81,640,000 | | 379,200,000 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 62,400,000 | | 65,400,000 | | 67,400,000 | | 70,400,000 | | 72,400,000 | | 338,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | | | | 506,100,000 | | 560,000,000 | | 616,000,000 | | 677,600,000 | | 745,360,000 | | 3,105,060,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK | | | | 44,265,000 | | 47,265,000 | | 50,265,000 | | 53,265,000 | | 55,265,000 | | 250,325,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga kencana dalam rangka penurunan unmetneed, | 76.97% | 77.00% | 600,000,000 | 77.10% | 660,000,000 | 77.20% | 720,000,000 | 77.25% | 780,000,000 | 77.32% | 840,000,000 | 77.32% | 3,600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB | | | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 180,000,000 | | 195,000,000 | | 210,000,000 | | 900,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB | | | | 200,000,000 | | 220,000,000 | | 240,000,000 | | 260,000,000 | | 280,000,000 | | 1,200,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan , Pergerakan, Pelayanan dan Pembangunan Program KKBPK untuk Untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana ( PKB/PLKB | | | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 180,000,000 | | 195,000,000 | | 210,000,000 | | 900,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi masyarakat Pedesaan ( IMP ) | | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerahKabupaten/kota | Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria | 0,71% | 0,75% | 602,687,500 | 0,80% | 740,000,000 | 0,87% | 807,000,000 | 0,92% | 875,500,000 | 1,04% | 947,750,000 | 1,04% | 3,972,937,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 0 | | 50,000,000 | | 52,000,000 | | 53,000,000 | | 55,000,000 | | 210,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan METODE Kotrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) | Jumlah akseptor KB MKJP | | | 90,087,500 | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 121,000,000 | | 133,100,000 | | 554,187,500 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang pelayanan KB | Jumlah Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro di Fasilitasi kesehatan termasuk jaringan dan jejaring | Informasi tentang program KB dan Kespro | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah peserta pelatihan CTU bagi tenaga medis | | | 112,600,000 | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 181,500,000 | | 199,650,000 | | 808,750,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Oprasional Pelayanan KB bergerak | Peranserta Tim medis didalam pelayanan | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 13 | Peningkatan kesertaan KB Pria | Jumlah akseptor KB Pria | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | | | 253,050,000 | | 380,000,000 | | 408,000,000 | | 438,800,000 | | 472,680,000 | | 1,952,530,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembanguan lintas sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB | | **0** | | 253,050,000 | | 280,000,000 | | 308,000,000 | | 338,800,000 | | 372,680,000 | | 1,552,530,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu di Kampung KB | | | | 0 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 400,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | | | **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS )** | Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB , BKR, BKL ) | 15% | 15% | 977,540,000 | 16% | 1,044,574,000 | 16% | 1,191,274,000 | 16% | 1,266,624,000 | 16% | 1,343,314,000 | 0.16 | 5,823,326,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | **873,740,000** | | **929,574,000** | | **1,004,774,000** | | **1,062,474,000** | | **1,125,249,000** | | 4,995,811,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 250,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga / UPPKS | | | | 168,550,000 | | 190,000,000 | | 209,000,000 | | 229,900,000 | | 252,890,000 | | 1,050,340,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | | | | 379,740,000 | | 379,574,000 | | 379,774,000 | | 379,974,000 | | 381,974,000 | | 1,901,036,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS ) | Informasi mewujudkan keluarga sejahtera | | | 0 | | 0 | | 25,000,000 | | 27,500,000 | | 27,775,000 | | 80,275,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosilaisasdi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( menjadi orang tua hebat, genre , kelanjut usiaan | Informasi tentang anak, remaja dan lansia | | | 275,450,000 | | 310,000,000 | | 341000000 | | 375100000 | | 412610000 | | 1,714,160,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | serta pengelolaan keuangan keluarga ) | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 14 | 04 | 2.02 | | Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 103,800,000 | | 115,000,000 | | 186,500,000 | | 204,150,000 | | 218,065,000 | | 827,515,000 |
| | 3 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 103,800,000 | | 115,000,000 | | 126,500,000 | | 139,150,000 | | 153,065,000 | | 637,515,000 |
| | 3 | 14 | 04 | 2.02 | 02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan operasional Pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS ) | | | | 0 | | 0 | | 60,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 190,000,000 |
| Meningkatknya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Pada DP3AP2KB Kota Denpasar | | | | | | | Persentase Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di DP3AP2KB Kota Denpasar | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Laporan keaunagn yang disusun sesuai SAP, Nilai Kinerja yang dinikai Inspektorat, tidak ada temuan temuan material | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 8 | 1 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 13,771,909,511 | 100% | 13,942,736,276 | 100% | 14,822,494,200 | 100% | 15,546,178,620 | 100% | 16,406,046,482 | 100% | 74,489,365,089.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja, Jumlah Peserta Forum PD, Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKjIP | NA | | 14,900,000 | | 17,000,000 | | 17,000,000 | | 19,500,000 | | 22,000,000 | | 90,400,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja | | 30 Orang | 4,500,000 | 30 Orang | 5,000,000 | 30 Orang | 5,000,000 | 30 Orang | 6,000,000 | 30 Orang | 7,000,000 | 30 Orang | 27,500,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.01 | 2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Peserta Forum PD | | 65 Orang | 8,900,000 | 65 Orang | 10,000,000 | 65 Orang | 10,000,000 | 65 Orang | 11,000,000 | 65 Orang | 12,000,000 | 65 Orang | 51,900,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.01 | 6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKjIP | | 30 Orang | 1,500,000 | 30 Orang | 2,000,000 | 30 Orang | 2,000,000 | 30 Orang | 2,500,000 | 30 Orang | 3,000,000 | 30 Orang | 11,000,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | | | 6,957,285,705 | | **7,653,014,276** | | **7,800,000,000** | | **7,878,000,000** | | **8,000,000,000** | | 38,288,299,981.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.02 | 1 | Sub kegoatanPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 34 Orang | 6,957,285,705 | 34 Orang | 7,653,014,276 | 34 Orang | 7,800,000,000 | 34 Orang | 7,878,000,000 | 34 Orang | 8,000,000,000 | 34 Orang | 38,288,299,981.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya | | 16 Orang | **50,000,000** | 17 Orang | **55,000,000** | 18 Orang | 60,000,000 | 19 Orang | 65,000,000 | 20 Orang | 70,000,000 | 20 Orang | 300,000,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.05 | 11 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat | | 16 Orang | 50,000,000 | 17 Orang | 55,000,000 | 18 Orang | 60,000,000 | 19 Orang | 65,000,000 | 20 Orang | 70,000,000 | 20 Orang | 300,000,000.00 |
| | 2 | **8** | **1** | **2.06** | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat | | | **617,478,656** | | **785,500,000** | | **979,050,000** | | **1,028,790,000** | | **1,148,169,000** | | 4,558,987,656.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Daerah yang disediakan | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 8 | 1 | 2.06 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 0 | | 0 | | 15,000,000 | | 16,500,000 | | 34,650,000 | | 66,150,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.06 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | 441,678,288 | | 485,000,000 | | 533,500,000 | | 538,685,000 | | 592,553,500 | | 2,591,416,788.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.06 | 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 18,655,368 | | 21,000,000 | | 23,100,000 | | 25,410,000 | | 27,951,000 | | 116,116,368.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetak dan Penggandaan | | | 35,195,000 | | 40,000,000 | | 44,000,000 | | 48,400,000 | | 53,240,000 | | 220,835,000.00 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Peserta Rapat | | | 121,950,000 | | 239,500,000 | | 363,450,000 | | 399,795,000 | | 439,774,500 | | 1,564,469,500 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1,362,000,000 | | 110,000,000 | | 112,000,000 | | 115,000,000 | | 82,000,000 | | **1,781,000,000** |
| | 2 | 8 | 1 | 2.07 | 02 | Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1,290,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,290,000,000 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap lainnya | | | | 72,000,000 | | 75,000,000 | | 77,000,000 | | 80,000,000 | | 82,000,000 | | 386,000,000 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.07 | 08 | Sub Kegiatan Pengadaan Aset tak berwujud | | | | **0** | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 0 | | 105,000,000 |
| | **2** | **8** | **1** | **2.08** | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan | | | **3,714,125,150** | | **4,157,940,000** | | **4,573,734,000** | | **5,031,107,400** | | **5,534,218,140** | | 23,011,124,690 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Sumber Daya dan Listrik | | | 140,400,000 | | 154,440,000 | | 169,884,000 | | 186,872,400 | | 205,559,640 | | 857,156,040 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 8 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | 3,573,725,150 | | 4,003,500,000 | | 4,403,850,000 | | 4,844,235,000 | | 5,328,658,500 | | 22,153,968,650 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | 2 | 8 | 1 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah | | | **1,056,120,000** | | **1,164,282,000** | | **1,280,710,200** | | **1,408,781,220** | | **1,549,659,342** | | **6,459,552,762** |
| | 2 | 8 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan | | | 48,100,000 | | 52,910,000 | | 58,201,000 | | 64,021,100 | | 70,423,210 | | 293,655,310 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan | | | 733,520,000 | | 806,872,000 | | 887,559,200 | | 976,315,120 | | 1,073,946,632 | | 4,478,212,952 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana (Belanja Modal) | | | 179,500,000 | | 200,000,000 | | 220,000,000 | | 242,000,000 | | 266,200,000 | | 1,107,700,000 |
| | 2 | 8 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan Pmeliharaan gedung | | | 95,000,000 | | 104,500,000 | | 114,950,000 | | 126,445,000 | | 139,089,500 | | 579,984,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |

# TABEL 6.2

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Setelah Perubahan

| Kode | | | | | Program /Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra pada Akhir Periode Renstra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | **Predikat Kota Layak Anak** | | **Utama** | **Utama** | **1,574,016,000** | **Utama** | **1,715,326,000** | **Utama** | **2,182,858,600** | **Utama** | **2,391,444,460** | **KLA** | **2,615,888,906** | KLA | **10,479,533,966** |
| **2** | **08** | **06** | | | **Program Pemenuhan Hak Anak** | Cakupan Indikator KLA | Utama | Utama | **1,290,100,000** | Utama | **1,419,110,000** | Utama | **1,561,021,000** | Utama | **1,717,123,100** | KLA | **1,888,835,410** | KLA | **7,876,189,510** |
| | **08** | **06** | **2.01** | | Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **597,800,000** | | **657,580,000** | | **723,338,000** | | **795,671,800** | | **875,238,980** | | **3,649,628,780** |
| **2** | **08** | **06** | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | organisasi | 13 organisasi | 135,100,000 | 13 organisasi | 148,610,000 | 13 organisasi | 163,471,000 | 13 organisasi | 179,818,100 | 13 organisasi | 197,799,910 | 13 organisasi | 824,799,010 |
| **2** | **08** | **06** | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 7 dokumen | 462,700,000 | 7 dokumen | 508,970,000 | 7 dokumen | 559,867,000 | 7 dokumen | 615,853,700 | 7 dokumen | 677,439,070 | 7 dokumen | 2,824,829,770 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **692,300,000** | | **761,530,000** | | **837,683,000** | | **921,451,300** | | **1,013,596,430** | | **4,226,560,730** |
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | | 92,500,000 | 200 orang | 101,750,000 | 200 orang | 111,925,000 | 200 orang | 123,117,500 | 200 orang | 135,429,250 | 200 orang | 564,721,750 |
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 124,250,000 | 1 dokumen | 136,675,000 | 1 dokumen | 150,342,500 | 1 dokumen | 165,376,750 | 1 dokumen | 181,914,425 | 1 dokumen | 758,558,675 |
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 217,750,000 | 1 dokumen | 239,525,000 | 1 dokumen | 263,477,500 | 1 dokumen | 289,825,250 | 1 dokumen | 318,807,775 | 1 dokumen | 1,329,385,525 |
| **2** | **08** | **06** | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 257,800,000 | | 283,580,000 | | 311,938,000 | | 343,131,800 | | 377,444,980 | | 1,573,894,780 |
| **2** | **8** | **7** | | | **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif** | 100% | 100% | **283,916,000** | 100% | **296,216,000** | 100% | **621,837,600** | 100% | **674,321,360** | 100% | **727,053,496** | 100% | **2,603,344,456** |
| **2** | **8** | **7** | **2.01** | | Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 2 dokumen | **68,700,000** | 2 dokumen | **76,000,000** | 2 dokumen | **143,600,000** | 2 dokumen | **156,960,000** | 2 dokumen | **171,156,000** | 2 dokumen | 616,416,000 |
| 2 | 8 | 7 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perangkat daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Perangkat daerah | | | | | 36 perangkat daerah | **60,000,000** | 36 perangkat daerah | **65,000,000** | 36 perangkat daerah | **70,000,000** | 36 perangkat daerah | 195,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 68,700,000 | 2 dokumen | 76,000,000 | 2 dokumen | 83,600,000 | 2 dokumen | 91,960,000 | 2 dokumen | 101,156,000 | 2 dokumen | 421,416,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.02** | | Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota | 200 Orang | | **55,000,000** | 200 orang | **60,000,000** | 200 orang | **252,000,000** | | **268,500,000** | | **282,650,000** | | 918,150,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.02** | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan Pengaduan | orang | | | | | 40 orang | **60,000,000** | 40 orang | **65,000,000** | 40 orang | **67,000,000** | 40 orang | 192,000,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.02** | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anakk Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan | | 55,000,000 | 100 layanan | 60,000,000 | 100 layanan | 65,000,000 | | 71,500,000 | | 78,650,000 | | 330,150,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.02** | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota | Dokumen | | | | | 1 dokumen | 67,000,000 | | 67,000,000 | | 70,000,000 | | 204,000,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.02** | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | | | | | 1 dokumen | 60,000,000 | | 65,000,000 | | 67,000,000 | | 192,000,000 |
| **2** | **8** | **7** | **2.03** | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | 4 kec | **160,216,000** | 4 kec | **160,216,000** | 4 kec | **226,237,600** | | **248,861,360** | | **273,247,496** | | 1,068,778,456 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat bdaerah Kabupaten/ Kota | laporan | | | | | 1 lap | **50,000,000** | 1 lap | **55,000,000** | 1 lap | **60,000,000** | 1 lap | 165,000,000 |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 160,216,000 | 2 dok | 160,216,000 | 2 dok | 176,237,600 | 2 dok | 193,861,360 | 2 dok | 213,247,496 | 2 dok | 903,778,456 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/ Kota | Dokumen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Indeks Pembangunan Gender (IPG )** | **97,77** | **97,77** | **1,576,404,113** | **97,77** | **2,383,160,000** | **97,77** | **3,304,676,000** | **97,77** | **3,569,623,600** | **97,77** | **3,892,203,961** | **97,77** | **14,501,067,674** |
| | | | | | | **Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG )** | **62,16** | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | | **62,16** | |
| **2** | **08** | **02** | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Anggaran responsif gender pada Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan | 10% | 20% | 830,975,000 | 20% | 1,328,762,500 | 50% | 1,508,638,750 | 60% | 1,653,502,625 | 75% | 1,809,352,888 | 75% | 7,131,231,763 |
| | | | | | | Persentase Anggaran responsif gender pada Belanja APBD | 20% | 20% | | 20% | | 50% | | 60% | | 75% | | 75% | |
| | | | | | | Persentase partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Soaial dan Ekonomi | 6.6% | 4.4% | | 4.4% | | 4.4% | | 4.4% | | 4.4% | | 4.4% | |
| **2** | **08** | **02** | **2.01** | | Kegiatan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak | | | 552,100,000 | | 692,000,000 | | 761,200,000 | | 837,320,000 | | 921,052,000 | | 3,763,672,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | - | 1 dok | 50,000,000 | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 60,500,000 | 1 dok | 66,550,000 | 1 dok | 232,050,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | - | 2 dok | 30,000,000 | 2 dok | 33,000,000 | 2 dok | 36,300,000 | 2 dok | 39,930,000 | 2 dok | 139,230,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 214,787,500 | 36 Perangkat daerah | 240,000,000 | 36 Perangkat daerah | 264,000,000 | 36 Perangkat daerah | 290,400,000 | 36 Perangkat daerah | 319,440,000 | 36 Perangkat daerah | 1,328,627,500 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 337,312,500 | 36 Perangkat daerah | 372,000,000 | 36 Perangkat daerah | 409,200,000 | 36 Perangkat daerah | 450,120,000 | 36 Perangkat daerah | 495,132,000 | 36 Perangkat daerah | 2,063,764,500 |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **278,875,000** | | **306,762,500** | | **387,438,750** | | **426,182,625** | | **468,300,888** | | 1,867,559,763 |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | **278,875,000** | 7 dok | 306,762,500 | 7 dok | 337,438,750 | 7 dok | 371,182,625 | 7 dok | 408,300,888 | 7 dok | 1,702,559,763 |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | 02 | Advokasi Kebijakan dan PendampinganPeningkatan partisipasi perenmpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | **0** | | 0 | 13 organisasi | 50,000,000 | 13 organisasi | 55,000,000 | 13 organisasi | 60,000,000 | 13 organisasi | 165,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | 330,000,000 | | 360,000,000 | | 390,000,000 | | 420,000,000 | | 1,500,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota | | | | 0 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 500,000,000 |
| **2** | **08** | **05** | | | **Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak** | **Persentase data terpilah Gender dan Anak pada OPD** | **10%** | **20%** | **152,167,500** | **30%** | **274,397,500** | **50%** | **301,837,250** | **60%** | **332,020,975** | **75%** | **365,223,073** | **75%** | **1,425,646,298** |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembuatan Profil Statistik Gender | | 1 profil | 152,167,500 | 1 profil | 274,397,500 | 1 profil | 301,837,250 | 1 profil | 332,020,975 | 1 profil | 365,223,073 | 1 profil | 1,425,646,298 |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1 dok | 105,397,500 | 1 dok | 222,397,500 | 1 dok | 244,637,250 | 1 dok | 269,100,975 | 1 dok | 296,011,073 | 1 dok | **1,137,544,298** |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | **Dokumen** | 1 dok | 46,770,000 | 1 dok | 52,000,000 | 1 dok | 57,200,000 | 1 dok | 62,920,000 | 1 dok | 69,212,000 | 1 dok | **288,102,000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **08** | **04** | | | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | **Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa Lurah)** | **n/a** | **4,6%** | **152,651,250** | **6,9%** | **280,000,000** | **6.9%** | **739,200,000** | **9.3%** | **769,550,000** | **9.3%** | **834,843,000** | **9.3%** | **2,776,244,250** |
| **2** | **08** | **04** | 2.01 | | Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | **81,890,000** | | **97,000,000** | | **161,700,000** | | **172,420,000** | | **179,000,000** | | **692,010,000** |
| **2** | **08** | **04** | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangaan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat daerah | | 0 | | 0 | 36 Perangkat daerah | 55,000,000 | 36 Perangkat daerah | 60,000,000 | 36 Perangkat daerah | 65,000,000 | 36 Perangkat daerah | **180,000,000** |
| **2** | **08** | **04** | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan edukasi KG dan Perlindungan anak bagi Keluarga | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1 dok | 40,000,000 | 1 dok | 50,000,000 | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 55,550,000 | 1 dok | 57,000,000 | 1 dok | **257,550,000** |
| **2** | **08** | **04** | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 1 lap | 41,890,000 | 1 lap | 47,000,000 | 1 lap | 51,700,000 | 1 lap | 56,870,000 | 1 lap | 57,000,000 | 1 lap | **254,460,000** |
| **2** | **08** | **04** | 2.02 | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota | Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya | | | **70,761,250** | | **129,000,000** | | **518,100,000** | | **531,790,000** | | **583,969,000** | | **1,833,620,250** |
| **2** | **08** | **04** | 2.02 | 01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 65,000,000 | | **230,000,000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 02 | Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | | 33,892,500 | 250 orang | 38,000,000 | 250 orang | 418,000,000 | 250 orang | 422,180,000 | 250 orang | 464,398,000 | | **1,376,470,500** |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | | 36,868,750 | 2 dok | 41,000,000 | 2 dok | 45,100,000 | 2 dok | 49,610,000 | 2 dok | 54,571,000 | 2 dok | **227,149,750** |
| 2 | 08 | 04 | 2.03 | | Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota | Cakupan Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota | | | **0** | | **54,000,000** | | **59,400,000** | | **65,340,000** | | **71,874,000** | | **250,614,000** |
| 2 | 08 | 04 | 2.03 | 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota | | | | 0 | | 54,000,000 | | 59,400,000 | | 65,340,000 | | 71,874,000 | | **250,614,000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | | | **Program Perlindungan Perempuan** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif** | 10% | 20% | **440,610,363** | 40% | **500,000,000** | 45% | **755,000,000** | 60% | **814,550,000** | 80% | **882,785,000** | 80% | **3,167,945,363** |
| 2 | 08 | 03 | **2.01** | | Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 160 Orang | 160 Orang | **105,000,000** | 160 Orang | **120,000,000** | 160 Orang | **202,000,000** | 160 Orang | **220,200,000** | 160 Orang | **239,000,000** | 160 Orang | **661,200,000** |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 dok | 105,000,000 | 1 dok | 120,000,000 | 1 dok | 132,000,000 | 1 dok | 145,200,000 | 1 dok | 159,000,000 | 1 dok | 661,200,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Perangkat daerah | | | | | 36 Perangkat Daerah | 70,000,000 | 36 Perangkat Daerah | 75,000,000 | 36 Perangkat Daerah | 80,000,000 | 36 Perangkat Daerah | 225,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **08** | **03** | **2.02** | | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 Orang | | **192,960,363** | | **220,000,000** | | **242,000,000** | | **261,250,000** | | **287,375,000** | | 1,203,585,363 |
| **2** | **08** | **03** | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | orang | 35 Orang | 40,000,000 | 40 orang | 50,000,000 | 45 orang | 55,000,000 | 45 orang | 55,550,000 | 45 orang | 61,105,000 | 45 orang | 261,655,000 |
| **2** | **08** | **03** | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan | 100 layanan | 152,960,363 | 100 layanan | 170,000,000 | 100 layanan | 187,000,000 | 100 layanan | 205,700,000 | 100 layanan | 226,270,000 | 100 layanan | 941,930,363 |
| **2** | **08** | **03** | **2.03** | | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | **142,650,000** | | **160,000,000** | | **311,000,000** | | **333,100,000** | | **356,410,000** | | 1,303,160,000 |
| **2** | **08** | **03** | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | laporan | | | | | 1 lap | **70,000,000** | 1 lap | **75,000,000** | 1 lap | **80,000,000** | 1 lap | 225,000,000 |
| **2** | **08** | **03** | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 40 orang | 50,000,000 | 40 orang | 50,000,000 | 40 orang | 50,000,000 | 40 orang | 50,000,000 | 40 orang | 50,000,000 | 40 orang | 250,000,000 |
| **3** | **08** | **03** | 2.03 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perempuan dlam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota | Orang | | | | | 35 orang | 70,000,000 | 40 orang | 75,000,000 | 45 orang | 80,000,000 | 45 orang | 225,000,000 |
| **2** | **08** | **03** | 2.03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 dok | 92,650,000 | 1 dok | 110,000,000 | 1 dok | 121,000,000 | 1 dok | 133,100,000 | 1 dok | 146,410,000 | 1 dok | 603,160,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)** | **n/a** | **55,70** | **3,701,307,500** | **56,80** | **4,239,354,000** | **57,30** | **6,392,154,000** | **57,80** | **6,790,054,000** | **58,30** | **7,197,249,000** | **58,30** | **28,320,118,500** |
| 2 | 14 | 02 | | | **Program Pengendalian Penduduk** | Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) | 1,96 | 1,96 | 348,850,000 | 1,94 | 429,200,000 | 1,92 | 1,177,300,000 | 1,88 | 1,237,950,000 | 1,86 | 1,299,065,000 | 1,86 | 4,492,365,000 |
| | | | | | | Persentase Kelompok kerja bangga kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang efektif | 9,3 % | 9,3% | | 9,3% | | 9,3% | | 13.9% | | 13.9% | | 13.9% | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | 0 | | 50,000,000 | | 882,000,000 | | 907,500,000 | | 935,000,000 | | 2,774,500,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | dokumen | | | | | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 67,000,000 | 1 dok | 194,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguan Kependudukan ( GDPK ) tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguan Kependudukan ( GDPK ) tingkat Kabupaten/ Kota | | | 0 | 1 dok | 50,000,000 | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 60,500,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 230,500,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 03 | Dukungan Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Jumlah Survei/ Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 187,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | Jumlah Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | 30,000,000 | 1 dok | 35,000,000 | 1 dok | 35,000,000 | 1 dok | 100,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 05 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | dokumen | | | | | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 189,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 06 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal | Jumlah dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal | dokumen | | | | | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 180,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 07 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota | dokumen | | | | | 1 dok | 64,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 67,000,000 | 1 dok | 196,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 08 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota | jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota | dokumen | | | | | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 187,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | Advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah satuan pendidikan yang mendapatakan Advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Satuan pendidikan | | | | | | 65,000,000 | | 64,000,000 | | 65,000,000 | | 194,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 10 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal | Jumlah Lporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal | laporan | | | | | 1 lap | 63,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 66,000,000 | 1 lap | 194,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 11 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di kelompok Kegiatan Masyarakat | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di kelompok Kegiatan Masyarakat | dokumen | | | | | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 62,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 187,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 12 | Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah organisasi yang mengikuti Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | organisasi | | | | | 13 organisasi | 65,000,000 | 13 organisasi | 65,000,000 | 13 organisasi | 65,000,000 | 13 organisasi | 195,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 13 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah organisasi yang mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | organisasi | | | | | 13 organisasi | 66,000,000 | 13 organisasi | 67,000,000 | 13 organisasi | 68,000,000 | 13 organisasi | 201,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 14 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Laporan Sarasehan Hasil pemutakhiran Data Keluarga | laporan | | | | | 1 lap | 60,000,000 | 1 lap | 62,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 187,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) | laporan | | | | | 1 lap | 50,000,000 | 1 lap | 51,000,000 | 1 lap | 52,000,000 | 1 lap | 153,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 348,850,000 | | 429,200,000 | | 1,112,300,000 | | 1,172,950,000 | | 1,234,065,000 | | 4,297,365,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 01 | Perumusan parameter Kependudukan | Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan | laporan | | | | | 1 lap | 60,000,000 | 1 lap | 62,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 187,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | 195,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | dokumen | | | | | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | 195,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 04 | Pemetaan kependudukan | Jumlah Dokumen Pemetaan kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 57,000,000 | 1 dok | 58,000,000 | 1 dok | 170,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 05 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | Rp 65,000,000 | 1 dok | 195,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | dokumen | | | | | 1 dok | 60,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 65,000,000 | 1 dok | 190,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan DIni) | | | | | | | | 62,000,000 | | 62,000,000 | | 65,000,000 | 1 dok | 189,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB utntuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana yang dibentuk | unit | | | | | 1 unit | 50,000,000 | 1 unit | 51,000,000 | 1 unit | 52,000,000 | 1 unit | 153,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga | Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga | laporan | | 0 | | 47,400,000 | | 50,000,000 | | 60,000,000 | | 70,000,000 | | 227,400,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 10 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan | dokumen | | | | | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 55,000,000 | 1 dok | 165,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | dokumen | 1 dok | 284,050,000 | 1 dok | 315,000,000 | 1 dok | 346,500,000 | 1 dok | 381,150,000 | 1 dok | 419,265,000 | 1 dok | 1,745,965,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | 1 lap | 50,000,000.00 | 1 lap | 51,000,000.00 | 1 lap | 52,000,000.00 | 1 lap | 153,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | dokumen | | 64,800,000 | | 66,800,000 | 1 dok | 68,800,000 | 1 dok | 70,800,000 | 1 dok | 72,800,000 | 1 dok | 344,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Lporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | laporan | | | | | | 60,000,000 | | 63,000,000 | | 65,000,000 | | 188,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | | | **Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )** | Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalanve Rate/ MPCR) | **57,18%** | **57,18%** | **2,374,917,500** | **57,25%** | **2,765,580,000** | **57,50%** | **3,660,580,000** | **57,75%** | **3,905,480,000** | **58.00%** | **4,167,870,000** | **58%** | **16,874,427,500** |
| | | | | | | Unmeetned | **0.71%** | 0.75% | | 0.80% | | 0.87% | | 0.92% | | 1.04% | | **1.04%** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 919,180,000 | | 985,580,000 | | 1,233,580,000 | | 1,315,180,000 | | 1,401,440,000 | | 5,854,960,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | organisasi | 4 organisasi | 210,775,000 | 4 organisasi | 212,775,000 | 4 organisasi | 214,775,000 | 4 organisasi | 216,775,000 | 4 organisasi | 218,775,000 | 4 organisasi | 1,073,875,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | dokumen | 1 dok | 25,000,000 | 1 dok | 27,500,000 | 1 dok | 29,500,000 | 1 dok | 31,500,000 | 1 dok | 33,000,000 | 1 dok | 146,500,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program Bangga Kencana | unit | | | | | | 125,000,000 | | 130,000,000 | | 135,000,000 | | 390,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | dokumen | 1 dok | 70,640,000 | 1 dok | 72,640,000 | 1 dok | 75,640,000 | 1 dok | 78,640,000 | 1 dok | 81,640,000 | 1 dok | 379,200,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronikdan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronikdan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | laporan | | | | | 1 lap | 55,000,000 | 1 lap | 57,000,000 | 1 lap | 60,000,000 | 1 lap | 172,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | laporan | 3 lap | 62,400,000 | 3 lap | 65,400,000 | 3 lap | 67,400,000 | 3 lap | 70,400,000 | 3 lap | 72,400,000 | 3 lap | 338,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | laporan | 5 lap | 506,100,000 | 5 lap | 560,000,000 | 5 lap | 616,000,000 | 5 lap | 677,600,000 | 5 lap | 745,360,000 | 5 lap | 3,105,060,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | laporan | 2 lap | 44,265,000 | 2 lap | 47,265,000 | 2 lap | 50,265,000 | 2 lap | 53,265,000 | 2 lap | 55,265,000 | 2 lap | 250,325,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga kencana | 76.97% | 77.00% | 600,000,000 | 77.10% | 660,000,000 | 77.20% | 720,000,000 | 77.25% | 780,000,000 | 77.32% | 840,000,000 | 77.32% | 3,600,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dalam rangka penurunan unmetneed, | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | organisasi | 8 organisasi | 150,000,000 | 8 organisasi | 165,000,000 | 8 organisasi | 180,000,000 | 8 organisasi | 195,000,000 | 8 organisasi | 210,000,000 | 8 organisasi | 900,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB | | | | 200,000,000 | | 220,000,000 | | 240,000,000 | | 260,000,000 | | 280,000,000 | | 1,200,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan , Pergerakan, Pelayanan dan Pembangunan Program KKBPK untuk Untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana ( PKB/PLKB | | | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 180,000,000 | | 195,000,000 | | 210,000,000 | | 900,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi masyarakat Pedesaan ( IMP ) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | orang | | 100,000,000 | 516 orang | 110,000,000 | 516 orang | 120,000,000 | 516 orang | 130,000,000 | 516 orang | 140,000,000 | 516 orang | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerahKabupaten/kota | Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria | 0,71% | 0,75% | 602,687,500 | 0,80% | 740,000,000 | 0,87% | 1,184,000,000 | 0,92% | 1,256,500,000 | 1,04% | 1,341,750,000 | 1,04% | 5,124,937,500 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 0 | | 50,000,000 | | 52,000,000 | | 53,000,000 | | 55,000,000 | | 210,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kompetensi pengelola dan petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah akseptor yang mengikutiPeningkatan Kompetensi pengelola dan petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | orang | | | | | | 45,000,000 | | 46,000,000 | | 47,000,000 | | 138,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan METODE Kotrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | orang | | 90,087,500 | 496 orang | 100,000,000 | 496 orang | 110,000,000 | 496 orang | 121,000,000 | 496 orang | 133,100,000 | | 554,187,500 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | laporan | | | | | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 68,000,000 | 1 lap | 198,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 05 | Penyusunan rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB | dokumen | | | | | 1 dok | 66,000,000 | 1 dok | 67,000,000 | 1 dok | 70,000,000 | 1 dok | 203,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana penunjang pelayanan KB | unit | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 07 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah orang mengikut Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | orang | | | | | | 55,000,000 | | 56,000,000 | | 57,000,000 | | 168,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro di Fasilitasi kesehatan termasuk jaringan dan jejaring | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | laporan | 30 lap | 100,000,000 | 30 lap | 110,000,000 | 30 lap | 120,000,000 | 30 lap | 130,000,000 | 30 lap | 140,000,000 | 30 lap | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan reproduksi, serta Hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan reproduksi, serta Hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | orang | | | | | | 76,000,000 | | 77,000,000 | | 77,000,000 | | 230,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | orang | 40 orang | 112,600,000 | 40 orang | 150,000,000 | 40 orang | 165,000,000 | 40 orang | 181,500,000 | 40 orang | 199,650,000 | 40 orang | 808,750,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Oprasional Pelayanan KB bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | laporan | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 12 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | orang | | | | | | 70,000,000 | | 70,000,000 | | 75,000,000 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 13 | Peningkatan kesertaan KB Pria | Jumlah akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 600,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | | | 253,050,000 | | 380,000,000 | | 523,000,000 | | 553,800,000 | | 584,680,000 | | 2,294,530,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | organisasi | | | | | 8 organisasi | 65,000,000 | 8 organisasi | 65,000,000 | 8 organisasi | 62,000,000 | 8 organisasi | 192,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembanguan lintas sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | dokumen | | 0 | | | 1 dok | 50,000,000 | 1 dok | 50,000,000 | 1 dok | 50,000,000 | | 150,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | **kampung** | 4 kampung | 253,050,000 | 4 kampung | 280,000,000 | 4 kampung | 308,000,000 | 4 kampung | 338,800,000 | 4 kampung | 372,680,000 | | 1,552,530,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu di Kampung KB | | | | 0 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 400,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | | | **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS )** | Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB , BKR, BKL ) | 15% | 15% | **977,540,000** | **16%** | **1,044,574,000** | **16%** | **1,554,274,000** | **16%** | **1,646,624,000** | **16%** | **1,730,314,000** | **16%** | **6,953,326,000** |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | **873,740,000** | | **929,574,000** | | **1,259,774,000** | | **1,327,474,000** | | **1,396,249,000** | | 5,786,811,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga remaja (BKR), Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarag Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga remaja (BKR), Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarag Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk | **kelompok** | | | | | | 45,000,000 | | 44,000,000 | | 45,000,000 | | 134,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | **unit** | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 250,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | orang | | | | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 180,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga / UPPKS | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | orang | 100 orang | 168,550,000 | 100 orang | 190,000,000 | 100 orang | 209,000,000 | 100 orang | 229,900,000 | 100 orang | 252,890,000 | 100 orang | 1,050,340,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | orang | 296 orang | 379,740,000 | 296 orang | 379,574,000 | 296 orang | 379,774,000 | 296 orang | 379,974,000 | 296 orang | 381,974,000 | 296 orang | 1,901,036,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | kelompok | | | | | | 40,000,000 | | 44,000,000 | | 45,000,000 | | 129,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS ) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS ) | | | 0 | | 0 | | 25,000,000 | | 27,500,000 | | 27,775,000 | | 80,275,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( menjadi orang tua hebat, genre , kelanjut usiaan serta pengelolaan keuangan keluarga ) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | laporan | | 275,450,000 | | 310,000,000 | | 341,000,000 | | 375,100,000 | | 412,610,000 | | 1,714,160,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 11 | Advokasi dan Promosi IPK | Jumlah orang yang mendapatkan advokasi dan promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | orang | | | | | | 25,000,000 | | 26,000,000 | | 27,000,000 | | 78,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 12 | Sosialisai IPK | Jumlah orang yang mengikuti iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | orang | | | | | 40 orang | 30,000,000 | 40 orang | 32,000,000 | 40 orang | 33,000,000 | | 95,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 13 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK | Jumlah Laporam hasil koordinasi dan evaluasi pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | laporan | | | | | 1 lap | 25,000,000 | 1 lap | 27,000,000 | 1 lap | 28,000,000 | | 80,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 14 | Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarag berkualitas | Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas | keluarga | | | | | | 30,000,000 | | 32,000,000 | | 33,000,000 | | 95,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 103,800,000 | | 115,000,000 | | 294,500,000 | | 319,150,000 | | 334,065,000 | | 1,166,515,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | **organisasi** | | 103,800,000 | 4 organisasi | 115,000,000 | 4 organisasi | 126,500,000 | 4 organisasi | 139,150,000 | 4 organisasi | 153,065,000 | 4 organisasi | 637,515,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan operasional Pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS ) | Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan operasional Pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS ) | laporan | | 0 | | 0 | 1 lap | 60,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 65,000,000 | 1 lap | 190,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | organisasi | | | | | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 175,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra kerja | Jumlah Laporan hasil Promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra kerja | laporan | | | | | 1 lap | 53,000,000 | 1 lap | 55,000,000 | 1 lap | 56,000,000 | | 164,000,000 |
| | | | | | | Persentase Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di DP3AP2KB Kota Denpasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Laporan keaunagn yang disusun sesuai SAP, Nilai Kinerja yang dinikai Inspektorat, tidak ada temuan temuan material | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 1 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 13,771,909,511 | 100% | 13,926,986,276 | 100% | 15,457,494,200 | 100% | 16,217,178,620 | 100% | 22,259,145,342 | 100% | 81,632,713,949 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja, Jumlah Peserta Forum PD, Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKjIP | NA | | 14,900,000 | | 17,000,000 | | 17,000,000 | | 19,500,000 | | 22,000,000 | | 90,400,000. |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 30 Orang | 4,500,000 | 30 Orang | 5,000,000 | 30 Orang | 5,000,000 | 30 Orang | 6,000,000 | 30 Orang | 7,000,000 | 30 Orang | 27,500,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 65 Orang | 8,900,000 | 65 Orang | 10,000,000 | 65 Orang | 10,000,000 | 65 Orang | 11,000,000 | 65 Orang | 12,000,000 | 65 Orang | 51,900,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD | | 30 Orang | 1,500,000 | 30 Orang | 2,000,000 | 30 Orang | 2,000,000 | 30 Orang | 2,500,000 | 30 Orang | 3,000,000 | 30 Orang | 11,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | | | 6,957,285,705 | | 7,653,014,276 | | 7,800,000,000 | | 7,878,000,000 | | 8,000,000,000 | | 38,288,299,981 |
| 2 | 8 | 1 | 2.02 | 1 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | | 34 Orang | 6,957,285,705 | 34 Orang | 7,653,014,276 | 34 Orang | 7,800,000,000 | 34 Orang | 7,878,000,000 | 34 Orang | 8,000,000,000 | 34 Orang | 38,288,299,981 |
| 2 | 8 | 1 | 2.05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya | | 16 Orang | **50,000,000** | 17 Orang | **55,000,000** | 18 Orang | 60,000,000 | 19 Orang | 65,000,000 | 20 Orang | 70,000,000 | 20 Orang | 300,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.05 | 11 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 16 Orang | 50,000,000 | 17 Orang | 55,000,000 | 18 Orang | 60,000,000 | 19 Orang | 65,000,000 | 20 Orang | 70,000,000 | 20 Orang | 300,000,000 |
| 2 | **8** | **1** | **2.06** | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | | | **617,478,656** | | **785,500,000** | | **1,029,050,000** | | **1,080,790,000** | | **1,203,169,000** | | 4,715,987,656 |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 0 | | 0 | | 15,000,000 | | 16,500,000 | | 34,650,000 | | 66,150,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | | 441,678,288 | | 485,000,000 | | 533,500,000 | | 538,685,000 | | 592,553,500 | | 2,591,416,788 |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | | 18,655,368 | | 21,000,000 | | 23,100,000 | | 25,410,000 | | 27,951,000 | | 116,116,368 |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | | | 50,000,000 | | 52,000,000 | | 55,000,000 | | 157,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | | 35,195,000 | | 40,000,000 | | 44,000,000 | | 48,400,000 | | 53,240,000 | | 220,835,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | paket | | 121,950,000 | | 239,500,000 | | 363,450,000 | | 399,795,000 | | 439,774,500 | | 1,564,469,500 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | **1,362,000,000** | | **110,000,000** | | **427,000,000** | | **442,000,000** | | **452,000,000** | | **2,793,000,000** |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 02 | Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | unit | | **1,290,000,000** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,290,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | unit | | | | | | 95,000,000 | | 97,000,000 | | Rp 100,000,000 | | 292,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan | unit | | | | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | | 150000000 | | 390,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap lainnya | Jumlah Aset Tetap lainnya yang disediakan | unit | | 72,000,000 | | 75,000,000 | | 77,000,000 | | 80,000,000 | | 82,000,000 | | 386,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 08 | Pengadaan Aset tak berwujud | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | unit | | **0** | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 0 | | 105,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan | unit | | **0** | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 165,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan | unit | | **0** | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 165,000,000 |
| **2** | **8** | **1** | **2.08** | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan | | | **3,714,125,150** | | **4,142,190,000** | | **4,598,734,000** | | **5,056,107,400** | | **10,682,317,000** | | 28,193,473,550 |
| 2 | 8 | 1 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat | **laporan** | | | | | | **25,000,000** | | **25,000,000** | | **25,000,000** | | 75,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | | 140,400,000 | | 154,440,000 | | 169,884,000 | | 186,872,400 | | 902,273,500 | | 1,553,869,900 |
| 2 | 8 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | | 3,573,725,150 | | 1,750,000 | | 417,850,000 | | 417,850,000 | | 5,328,658,500 | | 9,739,833,650 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | laporan | | 0 | | 3,986,000,000 | | 3,986,000,000 | | 4,426,385,000 | | 4,426,385,000 | | 16,824,770,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah | unit | | **1,056,120,000** | | **1,164,282,000** | | **1,525,710,200** | | **1,675,781,220** | | **1,829,659,342** | | **7,251,552,762** |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | | 48,100,000 | | 52,910,000 | | 58,201,000 | | 64,021,100 | | 70,423,210 | | 293,655,310 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | | 733,520,000 | | 806,872,000 | | 887,559,200 | | 976,315,120 | | 1,073,946,632 | | 4,478,212,952 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | unit | | 0 | | 0 | | 45,000,000 | | 47,000,000 | | 50,000,000 | | 142,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | | 179,500,000 | | 200,000,000 | | 220,000,000 | | 242,000,000 | | 266,200,000 | | 1,107,700,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | 95,000,000 | | 104,500,000 | | 114,950,000 | | 126,445,000 | | 139,089,500 | | 579,984,500 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | 0 | | 0 | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 115,000,000 | | 325,000,000 |
| 2 | 8 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | 0 | | 0 | | 100,000,000 | | 110,000,000 | | 115,000,000 | | 325,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | **20,623,637,124** | | **22,264,826,276** | | **27,337,182,800** | | **28,968,300,680** | | **35,964,487,209** | | **134,933,434,089** |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1 Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

Berikut diuraikan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar :

1. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1. Predikat Kota Layak Anak
    2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
    3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
    1. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebelum dan setelah perubahan ditampilkan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Sebelum Perubahan

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | | Target Akhir Renstra (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Rasio kekerasan terhadap anak | Angka | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 2 | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Angka | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 3 | Predikat Kota , Kecamatan , Desa /lurah Layak Anak | Predikat | utama | utama | utama | utama | utama | utama | KLA | KLA |
| 4 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks IPA | NA | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks IPG | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks IDG | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 |
| 7 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MCPR) | Persen | 76,58 | 57,18 | 57,18 | 57,25 | 57,50 | 57,75 | 58,00 | 58,00 |
| 8 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate/TFR) | Persen | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,88 | 1,86 | 1,86 |

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Setelah Perubahan

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Predikat Kota , Kecamatan , Desa /lurah Layak Anak | Predikat | utama | utama | utama | utama | utama | KLA | KLA |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks IPG | 96,67 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
| 3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks IDG | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 |
| 4 | Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) | Indeks ibangga | n/a | 55,70 | 56,80 | 57,30 | 57,80 | 58,30 | 58,30 |

## 7.2 Indikator kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel 7.3 sebagai berikut.

## Tabel 7.3

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 |
| 4 | Rasio KDRT | % | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur | % | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 |
| 13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) | | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | KLA | KLA |
| 15 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | % | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
| 16 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 | 62,16 |
| **BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | |
| 17 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % tahun | 1.85 | 1.85 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.8 |
| 18 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.86 | 1.86 |
| 19 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | - | - | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 21 | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Peraturan | - | - | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 22 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Unit | - | - | Semua | Semua | Semua | Semua | Semua | Semua |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kerjasama | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| 24 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Rasio Akseptor KB | % | 76.58 | 57.18 | 57.18 | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58 |
| 26 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | % | 76.58 | 57.18 | 57.18 | 57.25 | 57.5 | 57.75 | 58 | 58 |
| 27 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 100 perempuan usia 15-19 ( ASFR 15-19 ) | Per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun | 22/1.000 | 22/1.000 | 19/1000 | 18/1000 | 17/1000 | 16/1000 | 16/1000 | 16/1000 |
| 28 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 7,81 | 7,81 | 7.75 | 7.73 | 7,61 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 30 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 50,59 | 50,59 | 50,65 | 50,70 | 51 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| 31 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 30,05 | 30,05 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 32 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 70,07 | 70,07 | 72 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 33 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 77,25 | 77,25 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 67,95 | 67,95 | 68 | 68,50 | 69 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| 35 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 36 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | orang | 630 | 630 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 37 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | % | 55,32 | 55,32 | 55,25 | 56 | 56,5 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 40 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kampung (PPKBD) setiap kampung/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 42,91 | 42,91 | 43,0 | 43,7 | 55 | 43,8 | 44,0 | 44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kampung | % | 95.30 | 95.30 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 44 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Tahun | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 47 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0.0022 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 |

# BAB VIII
# PENUTUP

## 8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

## 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 September 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311995032001

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra**
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak,**
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
**Kota Denpasar**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | KESESUAIAN | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | ADA | TIDAK ADA | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja | √ | | | |
| 2 | Penyiapan data dan informasi | √ | | | |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 4 | Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi | √ | | | |
| 5 | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota | √ | | | |
| 6 | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 7 | Perumusan isu-isu strategis | √ | | | |
| 8 | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 9 | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | √ | | | |
| 10 | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 11 | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 12 | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 13 | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 14 | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan | √ | | | |
| 15 | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota | √ | | | |
| 16 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 17 | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah | √ | | | |
| 18 | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota | √ | | | |
| 19 | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 20 | Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan | √ | | | |

Denpasar, 9 September 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 199503 2 001